

SIKRIPSI

**KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN SORONG**



OLEH

Nama : Oktoriance Edowai

Nim : 146520122040

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN SORONG**

NAMA : Oktoriance Edowal
NIM : 146520122040

Telah disetujui pembimbing

Pada : 17 Juni 2026

Pembimbing I

Sofyan Muhamad, M.L.P.

NIDN.1430039301



Pembimbing II

Jusmin, M.Ec.Dev

NIDN.0012066601



HALAMAN PENGESAHAN**KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGIMPLEMENTASI
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN SORONG****NAMA : OKTORIANCE EDOWAI****NIM : 146520122040**

Sikripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada 15 Juni 2026

Dekan Fhisipol

Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I
NIDN. 1420089201



Tim Penguji Sikripsi

Sofyan Muhamad, M.I.P
NIDN. 1430039301



Edy Supardy, S.Sos., M.A.P
NIDN. 0012066601



Yoga Andriyan, M.I.P
NIDN. 1421059501



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebut daftar pustaka.

Sorong.

Yang membuat pernyataan

Oktoriance Edowai

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ☐ Aku Memulai Dalam Nama Yesus Kristus Dengan Penuh Keyakinan Aku Mengakhiri Dengan Kata Amin.
- ☐ Segala Perkara Dapat Kutanggung Didalam Dia, Yang Memberi Kekuatan KEPADAKU. **Filipi 4:13**
- ☐ Karena Masa Depan Sungguh Ada, dan Harapan Tidak Akan Hilang.

Amsal 23: 18

- ☐ Janganlah Hendaknya Kamu Kuatir Tentang Apapun Juga, Tetapi Nyatakanlah Dalam Segala Hal Keinginanmu Kepada Allah Dalam Doa dan Permohonan dengan Ucapan Syukur. Damai Sejahtera Allah, Yang Melampaui Segala Akal, Akan Memelihara Hati Dan Pikiranmu Dalam Kristus Yesus. **Filipi 4:6-7**
- ☐ Aku Di Tolak dengan Hebat Sampai Jatuh, Tetapi Tuhan Menolong Aku.

Mazmur 118:13

- ☐ Kerja Keras, Doa, dan Kesabaran Adalah Kunci Dari Setiap Pencapaian.

Persembahan :

Tidak ada lembar yang paling berarti dan paling indah dalam sikripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucapsyukur kepada Yesus Kristus, Bunda Maria sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang yang telah saya lalui untuk dapat menyelesaikan sikripsi ini demi mendapat gelar yang suda

saya impikan dari lama. Rasa syukur dan bahagia yang saya rasakan ini akan saya persembahkan juga kepada orang-orang yang sangat berarti dalam proses perjalanan saya, karena berkat doa dan dukungan dari mereka saya bisa menyelesaikan sikripsi ini dengan baik. Sikripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang menuntun, memberi kekuatan dan pertolongan, hikmat dan pengetahuan kepada penulis sehingga boleh ada sampai tahap ini, dan mengakhiri masa sikripsi dengan mengucapkan Puji Tuhan, Semua baik adanya.
2. Kepada Cinta pertama saya dalam hidup penulis Bapak Siprianus Edowai. Seorang Bapak yang menjadi alasan penulis masih bertahan sampai saat ini. Terimakasih Bapak karena telah mendukung setiap langkah perjalanan penulis. Terimakasih selalu memberikan kasih sayang yang sangat luarbiasa, nasihat, motivasi, semangat, dan doa yang terbaik untuk putri kecilmu ini. Semoga Bapak sehat selalu dan panjang umur, karena bapak harus ada disetiap perjalanan hidup penulis. Terimakasih banyak.
3. Kepada Pintu surgaku Mama Ice Mote. Perempuan hebat yang suda memebesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga mendapat gelar sarjana serta menjadi penyemangat bagi penulis. Beliau memang bukan seorang sarjana, tetapi beliau berhasil menjadikan anaknya seorang sarjana dari keluarga yang sederhana ini. Terimakasih untuk doa seorang ibu yang sangat luar biasa, kasih sayang, nasihat, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini.

Terimakasih atas semua perjuangan dan pengorbanan tulus dalam mengusahakan perjalanan dan pencapaian hidup saya selama ini, dan terimakasih juga suda melangitkan doa-doa baik untuk saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini hingga selesai. Semoga Mamak sehat dan hiduplah lebih lama lagi, (Amin), karena Mama harus ada disetiap perjalanan hidup penulis. Terimakasih banyak.

4. Dengan penuh rasa syukur, Sikripsi ini saya persembahkan kepada Kakak laki-laki saya Oswaldus Edowai yang telah Wafat pada 27 April 2026. Terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan, baik dalam bentuk dukungan finansial maupun perhatian yang tulus selama penulis menempuh perkuliahan. Terimakasih karena selalu menanyakan perkembangan perkuliahan penulis, serta kepedulian terhadap kebutuhan dan pengeluaran penulis, yang menjadi bentuk kasih sayang dan tanggung jawab yang sangat berarti. Dukungan dan perhatian yang kakak berikan menjadi salah satu alasan adik kecilmu ini untuk terus berjuang dan menyelesaikan sikripsi ini. Semoga Arwahnya diterima di sisi Bapa, Amin.
5. Dengan penuh rasa syukur, sikripsi ini saya persembahkan kepada adik-adik saya, Regina Edowai, Bonaventura Edowai dan Ranol Pakage. Terimakasih suda memberikan doa yang baik selama ini. Terimakasih suda membantu dan mendukung apapun yang penulis lakukan selama ini. Terimakasih juga karena selalu jadi penghibur disaat lelahnya penulis. Semangat juga meraih gelar dan buat bapa dan mama bangga dengan apa yang sudah kita usahakan selama ini. Jangan pernah menyerah dan jika lelah dan ingin menyerah ingatlah kembali

perjuangan Bapa dan Mama untuk membesarkan dan menyekolahkan kita.

6. Kepada Dosen Pembimbing penulis Bapak Sofyan Muhamad, M.I.P. dan Bapak Yoga Andriyan, M.I.P., yang telah membimbing, mengarahkan, dan memeberikan ilmu kepada penulis selama proses penyusunan sikripsi ini.
7. Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Dinas Bapperida Kabupaten Sorong dan SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong yang sudah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan memeberikan ilmu yang manfaat. Segala informasi dan pengalaman yang diperoleh menjadi bagian penting dalam penyelesaian sikripsi ini.
8. Terimakasih untuk teman-teman dan sahabat tercinta yang tidak pernah lelahg mendukung, mendoakan dan memeberikan semangat disetiap waktu disaat kuperlukan, semoga kita semua menjadi orang-orang sukses. Amin.

ABSTRAK

Oktoriance Edowai/ 146520122040. **KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM MAKANA BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN SORONG** Sikripsi. Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. Juni 2026.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari agenda nasional Asta Cita, serta mengidentifikasi strategi yang dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi unsur pemerintah daerah, dinas terkait, serta pihak sekolah. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong telah memiliki tingkat kesiapan awal dalam pelaksanaan Program MBG yang ditandai dengan adanya dukungan regulasi, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan sektor pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian, implementasi program masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, infrastruktur distribusi yang belum memadai, keterbatasan sumber daya manusia, serta kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau. Selain itu, diperlukan penguatan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan daerah agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong menerapkan berbagai strategi adaptasi, seperti melibatkan pelaku UMKM lokal dalam penyediaan pangan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menyesuaikan mekanisme distribusi sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapan pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada dukungan kebijakan nasional, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan, efektivitas koordinasi lintas sektor, dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengadaptasikan kebijakan dengan kondisi lokal guna mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: Kesiapan pemerintah daerah, implementasi kebijakan, makan bergizi gratis, Asta Cita, Kabupaten Sorong.

ABSTRAC

Oktoriance Edowai/ 146520122040. **READINESS OF REGIONAL AUTHORITIES IN THE IMPLEMENTATION OF THE FREE NUTRITIOUS FOOD PROGRAM IN SORONG REGENCY** Sicryption. Faculty of Law, Social and Political Sciences. Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. June 2026.

This study aims to analyze the readiness of the Sorong Regency Regional Government in implementing the Free Nutritious Meal Program (MBG) as part of Asta Cita's national agenda, as well as identify strategies carried out to adjust the implementation of the program to local conditions. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The research informants include elements of local government, related agencies, and schools. The data obtained was analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawn.

The results of the study show that the Sorong Regency Government has had an initial level of readiness in the implementation of the MBG Program which is characterized by regulatory support, cross-sector coordination, and involvement of the education and health sectors. However, the implementation of the program still faces a number of obstacles, including budget limitations, inadequate distribution infrastructure, limited human resources, and difficult geographical conditions in the area. In addition, it is necessary to strengthen the synchronization between central government policies and regional needs so that the implementation of the program can run more effectively and on target.

To overcome these challenges, the Sorong Regency Regional Government has implemented various adaptation strategies, such as involving local MSME actors in food supply, strengthening coordination between agencies, and adjusting distribution mechanisms according to the social conditions of the local community. This study concludes that the readiness of local governments is a key factor in the successful implementation of the Free Nutritious Meal Program. The success of the program depends not only on national policy support, but also on institutional capacity, the effectiveness of cross-sectoral coordination, and the ability of local governments to adapt policies to local conditions to support the improvement of community nutrition quality and human resource development towards a Golden Indonesia 2045.

Keywords: Local government readiness, policy implementation, free nutritious meals, Asta Cita, Sorong Regency.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat, Karunia, dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong Program S1 Studi Ilmu Pemerintahan Dengan **Judul Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Di Kabupaten Sorong.**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak tantangan, hambatan, dan keterbatasan yang dihadapi, Namun, berkat dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya dalam setiap proses kehidupan penulis.
2. Dr. Rustamadji, M.Si. Selaku rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
3. Ibu Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. Selaku Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
4. Bapak Sofyan Muhamad, M.I.P. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak Sofyan Muhamad, M.I.P. Selaku Pembimbing I (satu) yang senantiasa meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis.

6. Bapak Yoga Andriyan, M.I.P. Selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang juga telah meluangkan waktu dan pikiran serta telah memberikan masukan dalam penulisan proposal hingga skripsi ini.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen program studi ilmu pemerintahan fakultas hukum ilmu sosial dan politik, yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Ucapan terima kasih yang paling dalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua tersayang, tercinta, bapak Siprianus Edowai dan Ibu Ice Mote, yang selalu menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan doa dalam setiap langkah kehidupan penulis.
9. Ucapan terima kasih juga buat wauwa (kakak) Almarhum Oswaldus Edowai, adik Regina, adik jeklin, Adik Ranol, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta menjadi penghibur dalam setiap proses yang dilalui penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Demianus Badii yang telah mendukung dan membantu selama perkuliahan penulis. Terima kasih telah meringankan pengeluaran penulis dan turut memberikan motivasi bagi penulis.
11. Ucapan terima kasih juga kepada kaka Jack Edowai yang telah mendukung penulis dan memberikan motivasi serta perhatian untuk penulis. Terima kasih sudah turut membantu meringankan pengeluaran penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Ucapan terima kasih juga buat sahabat-sahabat saya Diana, Paulina, Ruce, christin, terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik buat penulis dan terima kasih atas segala dukungan, doa, kasih sayang, perhatian, nasihat,

serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

13. Ucapan terima kasih juga buat adik nona (Ria), terima kasih suda menjadi adik, teman, sahabat yang baik buat penulis dan terimakasih atas segala doa, kasih sayang, perhatian, nasihat, serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih pada pihak tempat penelitian, Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Dinas Bapperida Kabupaten Sorong dan SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong dan Siswa SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong, serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan, bantuan, dukungan, serta informasi selama penelitian berlangsung.
15. Terimakasih kepada organisasi HIMIP UNIMUDA, UKM-KMK UNIMUDA yang menjadi tempat penulis belajar dan berkembang, yang telah memberikan pengalaman, pembelajaran, relasi, serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, tanggung jawab, dan wawasan penulis selama masa perkuliahan.

DAFTAR ISI

SIKRIPSI.....	i
PERNYATAAN	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
Motto :.....	ix
Persembahan :.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMIPRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kajian Teori.....	10
2.1.1 Kesiapan Pemerintah (<i>governance readiness</i>)	10
2.1.2 Implementasi Kebijakan (<i>Policy Implementation</i>)	11
2.1.3 Kebijakan Pangan dan Kesejahteraan Sosial (<i>Governing Food Security and Social Policy</i>).....	13
2.2 Penelitian Terdahulu	15
2.3 Definisi Konseptual	21
2.3.1 Kesiapan Pemerintah Daerah	21
2.3.2 Program Asta Cita.....	21
2.3.3 Program Makan Bergizi Gratis.....	22
2.4 Definisi Oprasional.....	22
2.5 Kerangka Berpikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	38

3.4 Teknik Pengumpulam Data.....	40
3.5 Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
4.1.1 Kabupaten Sorong	44
4.1.2 Program Makan Bergizi Gratis	45
4.1.3 Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong.....	46
4.1.4 Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong	47
4.1.5 Bapperida (Bappeda) Kabupaten Sorong	49
4.1.6 Profil SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong	50
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	52
4.2.1 Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis	52
4.2.2 Strategi dan Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Tingkat Lokal	65
BAB V PENUTUP.....	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2. Definisi Operasional	22
Tabel 3 Subjek Penelitian.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Kerangka Berpikir	37
--	----

DAFTAR LAMIPRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara.....	92
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian	97
Lampiran 3 Dokumen Badan Gizi Nasional.....	98
Lampiran 4 Dokumentasi.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu ketahanan pangan dan akses terhadap gizi semakin menjadi tantangan global yang semakin kompleks di abad ke-21. Menurut *Food and Agriculture Organization (FAO)*, sekitar 2,4 miliar orang di dunia mengalami kerawanan pangan pada tahun 2023 akibat perubahan iklim, konflik, serta ketimpangan ekonomi yang memperburuk akses terhadap pangan bergizi (Alta, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya isu ekonomi, melainkan juga berkaitan erat dengan pembangunan manusia dan keberlanjutan sosial. Ditingkat global, banyak negara telah meluncurkan program makan bergizi gratis di sekolah sebagai intervensi sosial untuk menekan angka stunting dan gizi buruk pada anak. Program seperti *National School Lunch Program* di Amerika Serikat dan *Midday Meal Scheme* di India terbukti meningkatkan kehadiran siswa, prestasi belajar, serta status gizi anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah. Dengan demikian, program makan bergizi gratis menjadi salah satu instrumen kebijakan publik yang efektif dalam membangun sumber daya manusia unggul (WFP, 2020; WFP, 2013).

Dalam konteks Indonesia, isu gizi dan ketahanan pangan masih menjadi persoalan strategis nasional. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023 menunjukkan angka stunting nasional mencapai 21,5%, meskipun telah menurun dari tahun sebelumnya. Pemerintah kemudian memperkenalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu visi *Asta Cita* Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 (Mazda & Nurhayati, 2025).

Pemerintah secara resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 dan hingga akhir tahun 2025 program tersebut telah berjalan hampir satu tahun. MBG menjadi salah satu program prioritas Nasional yang termasuk dalam delapan Asta Cita Presiden RI, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Secara khusus, Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari Asta Cita ke-4 yang berfokus pada penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), termasuk pengembangan sains dan teknologi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Program ini diarahkan untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan produktif sebagai fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045 (Kemenkeu, 2025).

Program ini berlandaskan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 mengatur tentang kebijakan strategi pangan dan gizi, yang menekankan pentingnya ketahanan pangan dan gizi dalam pembangunan sumber daya manusia, diperkuat dengan pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Perpres No. 83 Tahun 2024 untuk koordinasi antarlembaga yang lebih efektif dan berkelanjutan (Amril & Sazali, 2025). Asta Cita merupakan delapan agenda pembangunan strategi yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan ekonomi nasional. Salah satu prioritas utama program ini adalah penyediaan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil sebagai upaya menurunkan stunting dan memperkuat ketahanan pangan keluarga (Hali, 2025). Kebijakan ini menuntut kesiapan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah dalam aspek perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan di lapangan. Program ini digagas oleh Pemerintahan Prabowo sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi Indonesia maju, mandiri, dan berkeadilan, mengingat pemenuhan gizi yang memadai sejak dini merupakan fondasi penting dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas (Agustini, 2025). Tujuan utama program ini adalah

untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi gratis di sekolah dan fasilitas kesehatan (Albaburrahim, 2025).

Berdasarkan Hasil Survei Indonesia (SKI) 2023 rata-rata nasional mencatat prevalensi stunting sebesar 21,5% dan telah terjadi penurunan prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir (2013-2023). Akan tetapi, progres ini belum dapat memenuhi target RP JMN 2020-2024 yang menargetkan prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 15 provinsi memiliki prevalensi stunting di bawah angka Nasional. Tiga provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi adalah Papua Tengah (39,4%), Nusa Tenggara Timur (37,9%), dan Papua Pegunungan (37,3%). (Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor kesehatan di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama di wilayah Kabupaten Sorong. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pencegahan penyakit semakin meningkat, yang berdampak pada tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai program kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong. Salah satu tujuan utama dari upaya tersebut adalah memperkuat edukasi kesehatan guna mendorong penerapan pola hidup sehat di kalangan masyarakat (Dinkes Kab. Sorong, 2025).

Masalah Gizi di Kabupaten Sorong menjadi fokus perhatian pemerintah melalui berbagai program dan intervensi yang bertujuan untuk mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting pada anak balita. Upaya yang dilakukan meliputi pemberian makan tambahan bergizi, pendirian rumah pemulihan gizi, penyuluhan gizi bagi orang tua, serta penguatan peran kader posyandu. Selain itu, kerja sama lintas sektor antar pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat turut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program tersebut. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,

Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sorong, Jenny Pendek, menyampaikan bahwa prevalensi stunting di daerah tersebut terus menunjukkan penurunan secara signifikan. Berdasarkan data dirilis melalui aplikasi e-PPGBM tahun 2024, angka stunting di Kabupaten Sorong tercatat sebesar 17 persen, sedangkan hasil survei Nasional menunjukkan angka 25,1% (Tribun Sorong, 2025).

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup memiliki tingkat konsentrasi lebih tinggi, prestasi akademik yang lebih baik, serta tingkat kehadiran yang lebih stabil di sekolah. Sebaliknya, kurangnya asupan gizi dapat menyebabkan masalah kognitif jangka panjang, seperti keterlambatan perkembangan mental dan rendahnya kapasitas berpikir kritis. Untuk mengatasi masalah ini, kebijakan Makan Bergizi Gratis yang berorientasi pada pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfungsi untuk menekan angka malnutrisi, tetapi juga memastikan bahwa setiap siswa, terutama dari kelompok ekonomi rendah, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara akademik dan sosial (Rif'iy Qomarrullah, 2025).

Implementasi program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong menjadi penting karena wilayah ini mencerminkan tantangan desentralisasi kebijakan sosial di daerah terpencil. Kesiapan pemerintah daerah dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, dan tatakelola anggaran menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program nasional tersebut. Sehingga Pemerintah Daerah, sebagai garda terdepan dalam implementasi, harus mampu mengidentifikasi kebutuhan spesifik di wilayahnya serta memastikan distribusi yang merata dan tepat sasaran, dengan dukungan aktif dari elemen masyarakat (Herdiana, 2025). Untuk itu, diperlukan koordinasi antar lembaga yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah, serta pelibatan aktif masyarakat sipil, guna memastikan bahwa pelaksanaan program ini benar-benar mencerminkan kebutuhan riil dan aspirasi lokal (Agustini, 2025).

Bedasarkan pengamatan peneliti, Secara sosial: fenomena rendahnya kesadaran gizi di masyarakat Sorong disebabkan oleh budaya konsumsi pangan yang masih bergantung pada bahan pokok karbohidrat dan minim protein hewani, hal ini berdampak pada pola pertumbuhan anak yang kurang optimal serta meningkatnya risiko gizi buruk di kalangan keluarga berpenghasilan rendah. Dari sisi psikologi dan moral, ketidakmerataan akses gizi menciptakan kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali mengalami penurunan rasa percaya diri dan prestasi belajar akibat keterbatasan asupan nutrisi, yang pada akhirnya menghambat pembangunan manusia di daerah tertinggal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program pangan bersubsidi dan bantuan gizi seperti *Raskin* atau Beras untuk Rakyat Miskin mampu meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga miskin, namun belum signifikan dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat (Simbolon & Shylenra, 2022). Sementara itu, program makan bergizi gratis yang lebih komprehensif masih relatif baru diimplementasikan di Indonesia. Studi oleh Pambudi, (2024) Menyoroti bahwa tantangan utama pelaksanaan program makan bergizi gratis di Indonesia terletak pada koordinasi antar lembaga, mekanisme distribusi pangan, serta pengawasan kualitas gizi. Dengan demikian, kesiapan pemerintah menjadi faktor kunci keberhasilan program ini.

Selain itu, analisis komparatif dengan program serupa di Brazil, India, dan Finlandia menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan kualitas modal manusia, meskipun dampaknya terhadap penurunan stunting dan anemia masih memerlukan verifikasi lebih lanjut karena keterbatasan penargetan dan sistem pelacakan hasil yang belum formal. Bahkan, performa implementasi program ini masih rendah, dengan hanya 5,6 juta penerima manfaat dan 1.873 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tercapai hingga paruh pertama 2025, serta distribusi yang tidak

merata di berbagai wilayah (Suprpto, 2025). Beberapa penelitian internasional menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan dan berbasis partisipasi lokal dalam program bantuan pangan. Namun, studi di tingkat lokal, khususnya di Kawasan Timur Indonesia seperti Sorong, masih sangat terbatas. Padahal, konteks geografis dan sosial daerah ini mempengaruhi implementasi kebijakan secara signifikan.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada kurangnya kajian kualitatif yang menelaah bagaimana pemerintah daerah menafsirkan, menyiapkan, dan melaksanakan kebijakan nasional terkait Asta Cita, khususnya dalam program makan bergizi gratis. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada evaluasi hasil, bukan pada proses implementasi kebijakan dan kapasitas institusional di tingkat daerah. Selain itu, pendekatan kebijakan publik di wilayah Timur Indonesia masih didominasi oleh studi kuantitatif berbasis survei, tanpa menggali persepsi pengalaman, dan strategi adaptasi lokal yang dimiliki oleh aktor pemerintahan daerah. Pendekatan kualitatif diperlukan untuk memahami dinamika sosial dan birokrasi yang memengaruhi efektifitas kebijakan.

Penelitian ini juga menjawab kebutuhan literatur tentang kesiapan kelembagaan pemerintah daerah dalam menjalankan agenda nasional yang bersifat lintas sektor, seperti gizi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis terhadap proses kebijakan. Melalui studi kualitatif di Kabupaten Sorong, penelitian ini berupaya menggambarkan realitas empiris mengenai kesiapan Pemerintah Daerah dalam implementasi Asta Cita, khususnya Program Makan Bergizi Gratis. Fokus analisis diarahkan pada aspek kesiapan Pemerintah Daerah, tantangan utama yang di hadapi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan makan bergizi gratis, dan strategi atau upaya Pemerintah Daerah dalam menyesuaikan kebijakan makan bergizi gratis di tingkat lokal.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teorik dalam pengembangan kajian kebijakan publik dan pembangunan sosial di Indonesia, terutama dalam konteks desentralisasi dan pemerataan layanan dasar. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas pelaksanaan program gizi nasional. Dengan demikian urgensi penelitian ini terletak pada upaya memahami kesiapan pemerintah daerah sebagai faktor krusial dalam keberhasilan implementasi Asta Cita Makan Bergizi Gratis. Tujuan utamanya adalah menganalisis secara mendalam kesiapan struktural, kultural, dan manajerial pemerintah Kabupaten Sorong dalam melaksanakan program makan bergizi gratis demi mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengasumsikan bahwa keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sorong sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi lokal, baik dari segi struktur organisasi, budaya kerja, maupun kemampuan manajerial. Oleh karena itu, berlandaskan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penulis sangat tertarik meneliti terkait Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong. Melalui kajian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan studi kebijakan publik dan Ilmu Pemerintahan sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi peningkatan efektivitas implementasi program gizi nasional di tingkat daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang di rumuskan berdasarkan *research gap*, sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis?

2. Bagaimana strategi dan upaya Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis di tingkat lokal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan yang dapat penulis ambail:

1. Menganalisis tingkat kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Sorong dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis, mencakup aspek sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, dan koordinasi antarinstansi.
2. Mendeskripsikan strategi dan upaya adaptasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam menyesuaikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar selaras dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat dihasilkan melalui penulisan ini terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu kebijakan publik dan pembangunan sosial, terutama dalam konteks implementasi kebijakan nasional di daerah terpencil.
2. Menambah literatur mengenai pendekatan kualitatif dalam studi kebijakan gizi dan ketahanan pangan di Indonesia Bagian Timur.

B. Manfaat Praktis

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam memperkuat kesiapan kelembagaan dan tatakelola program gizi nasional.

2. Memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar instansi dan partisipasi masyarakat.
3. Memberikan masukan bagi lembaga pendidikan, kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung Faktor-faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi kesiapan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Berikut ini adalah landasan teori yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Soromg, sebagai berikut:

2.1.1 Kesiapan Pemerintah (*governance readiness*)

Salah satu kerangka penting adalah teori “*readiness for change*” atau kesiapan organisasi untuk melakukan perubahan. Dalam konteks pemerintahan daerah, kesiapan ini mencakup aspek regulasi anggaran, struktur, sumber daya manusia, budaya organisasi, dan koordinasi antara sektor. Misalnya, Public Administration literatur Indonesia menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah lokal dalam menerapkan kebijakan sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, infrastruktur, dan budaya organisasi yang adaptif (Fitriyani & salomo, 2024).

Kesiapan pemerintah (*governance readiness*) menggambarkan kapasitas institusional, regulatif dan administratif suatu pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan publik yang efektif. Menurut Clark (1978), kesiapan pemerintah mencakup dimensi kemampuan perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan kesiapan birokrasi untuk mendukung kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks program makan bergizi gratis, kesiapan ini mengharuskan adanya koordinasi lintas sektor antar dinas pendidikan, kesehatan, dan sosial agar implementasi kebijakan berjalan efisien dan tepat sasaran.

Kesiapan pemerintah dalam implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan perencanaan, tetapi juga juga oleh kapasitas birokrasi, pengelolaan sumber daya, serta komitmen lintas sektor dalam mendukung tujuan kebijakan. Studi terkini

menunjukkan bahwa keberhasilan program publik, khususnya di sektor pangan dan gizi, sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial agar kebijakan dapat dijalankan secara efisien dan tepat sasaran (Parsons & Barling, 2022; Ng, 2022),

Selain itu, Oehmke (2022), menekankan pentingnya kesiapan kebijakan (*policy readiness*) indeks untuk mengukur kesiapan suatu negara dalam mengadopsi kebijakan pertanian dan pangan yang efektif. Indeks ini mempertimbangkan faktor politik, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Penerapan kebijakan makan bergizi gratis memerlukan kesiapan di keempat aspek ini agar program tidak hanya terlaksana secara administratif tetapi juga berkelanjutan secara sosial-ekonomi. Dengan demikian, kesiapan pemerintah merupakan fondasi utama dalam memastikan keberhasilan kebijakan berbasis kesejahteraan sosial.

Boudu (2024), juga menegaskan bahwa pemerintah yang siap harus mengedepankan kolaborasi dan tata kelola terbuka (*open governance*). Dalam konteks Kabupatén Sorong, ini berarti melibatkan pemangku kepentingan lokal, seperti sekolah, organisasi masyarakat, dan pihak swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Pendekatan partisipatif ini meningkatkan legitimasi kebijakan dan memperkuat efektivitas implementasinya.

2.1.2 Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Teori ini membahas bagaimana suatu kebijakan yang dirancang di tingkat daerah. Misalnya model klasik Donald L. Lindblom dan Charles E. Lindblom (1959) hingga model terbaru yang melihat faktor pendukung seperti komunikasi, sumber daya, karakteristik penerima, dan lingkungan. Studi terkini di Indonesia juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan gizi misalnya pada program percepatan penurunan stunting terbentur oleh komunikasi yang kurang, sumber daya terbatas, dan struktur birokrasi yang kompleks (Banunaek, 2024).

Teori implementasi kebijakan berfokus pada proses penerjemahan keputusan politik menjadi tindakan nyata di lapangan. Menurut Hunga (2023), keberhasilan implementasi ditentukan oleh kesiapan organisasi, struktur birokrasi, komunikasi antar unit, serta dukungan sumber daya. Dalam konteks program makan bergizi gratis, teori ini menekankan bahwa strategi implementasi harus disesuaikan dengan karakteristik lokal seperti kondisi sosial, geografis, dan infrastruktur Kabupaten Sorong.

Mwangi (2024), menambahkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga bergantung pada kerangka regulasi yang menghubungkan strategi kebijakan dengan realitas sosial. Pemerintah perlu memastikan adanya payung hukum yang kuat, sistem pengawasan yang transparan, serta indikator keberhasilan yang terukur untuk mencegah kebijakan bersifat simbolik semata.

Dalam pelaksanaan program publik yang kompleks, seperti kebijakan pangan dan gizi, koordinasi lintas sektor dan konsistensi kebijakan faktor kunci keberhasilan implementasi. Lemahnya koordinasi antar lembaga berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan menegaskan bahwa efektivitas program nasional, termasuk program makan bergizi, sangat ditentukan oleh integrasi antarinstansi serta manajemen program yang adaptif terhadap konteks dan dinamika lokal (Rasul & Neupane, 2021; WHO, 2021; Gooding, 2022).

Selain itu implementasi kebijakan klasik dan kontemporer, penelitian ini juga diperkuat dengan Teori Spektrum Proses Kebijakan Gizi yang dikembangkan oleh Pelletier (2012), melalui *Mainstreaming Nutrition Initiative*. Teori ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan gizi tidak dapat dipahami secara sempit hanya pada tahap pelaksanaan, melalui dari agenda setting, formulasi kebijakan, hingga implementasi dan penguatan kapasitas. Pelletier (2012), menjelaskan bahwa kegagalan implementasi kebijakan gizi di banyak negara berkembang bukan disebabkan oleh ketiadaan intervensi yang efektif, melainkan oleh

lemahnya kapasitas strategis dan manajerial pemerintah dalam menerjemahkan komitmen politik menjadi rencana operasional yang konkret. Teori ini mempertegas bahwa kesiapan pemerintah bukan hanya persoalan anggaran, tetapi juga kapasitas strategi, kepemimpinan, kebijakan, dan sistem koordinasi yang berkelanjutan.

Teori implementasi juga dapat merujuk pada model implementasi kebijakan Edward III, sebagaimana digunakan secara empiris dalam penelitian Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bondowoso oleh Sara Meirina Sari (2025). Model Edwards III menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh tiga tahap utama seperti; Perencanaan (*planning*), Pelaksanaan (*implementation*), dan Pengawasan (*monitoring*)

Hasil penelitian di Bondowoso menunjukkan bahwa meskipun kebijakan Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh:

- a) Kesiapan sumber daya manusia lokal,
- b) Kejelasan mekanisme koordinasi antara unit pelaksana (SPPG), sekolah, dan pemerintah daerah
- c) Keterbatasan kapasitas pengawasan akibat kendala anggaran dan struktur kelembagaan.

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan membantu menggambarkan proses transformasi kebijakan makan bergizi gratis dari desain di pusat, penurunan ke daerah hingga pelaksanaan di lapangan.

2.1.3 Kebijakan Pangan dan Kesejahteraan Sosial (*Governing Food Security and Social Policy*)

Program makan bergizi gratis termasuk dalam ranah kebijakan kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan. Teori kebijakan pangan menggarisbawahi bahwa ketersediaan pangan

saja tidak cukup, melainkan aksesibilitas, pemanfaatan (utilisation) dan stabilitas harus diperhatikan. Di Indonesia, penelitian *Evaluating Food Security Policy Implementation* menggunakan kerangka *adaptive governance* dalam konteks kebijakan pangan lokal, menekankan empat pilar ketahanan pangan: ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas. Dalam konteks program makan bergizi gratis, teori ini membantu menilai sejauh mana kebijakan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Sundari & Yusran, 2025); (FAO, 2008).

Teori ini menyoroti bagaimana pemerintah mengatur sistem pangan sebagai bagian dari strategi kesejahteraan sosial. Menurut Candel (2014), tatakelola pangan mencakup koordinasi lintas sektor yang menghubungkan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan dengan tujuan mengurangi ketimpangan sosial. Dalam konteks program makan bergizi gratis, teori ini relevan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap ketahanan pangan rumah tangga dan peningkatan gizi masyarakat miskin di Kabupaten Sorong.

Agarwala (2022), menegaskan bahwa kebijakan pangan harus mengintegrasikan aspek berkelanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemerintah harus memastikan bahwa program makan bergizi tidak hanya berorientasi jangka pendek misalnya pengadaan makanan, tetapi juga mendorong kemandirian pangan lokal melalui pemberdayaan petani, pengelolaan gizi masyarakat, dan edukasi pangan sehat. Pendekatan ini memungkinkan kebijakan pangan berfungsi ganda sebagai instrumen pembangunan sosial.

Tjilen, Tambaip, & Dharmawan (2024), menggarisbawahi pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pangan. Pendekatan partisipatif dalam *food security governance* meningkatkan efektivitas kebijakan dan menjamin keberlanjutan sosial. Dalam kasus Kabupaten Sorong, pelibatan masyarakat lokal

dan lembaga adat dapat memperkuat nilai inklusivitas dan memastikan kebijakan makan bergizi gratis selaras dengan konteks sosial budaya daerah.

Analisis penelitian ini akan melihat bagaimana kesiapan pemerintah dalam implementasi kebijakan, dan mencapai tujuan pangan bergizi gratis. Dengan demikian, penelitian akan mampu menelaah bukan hanya tentang apakah program berjalan, tetapi juga mengapa berjalan atau tidak berjalan secara optimal di konteks lokal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Tahun	Metode	Hasil
Sahroji, Q. N. & Hidayat, R	Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Karawang	2002	Kualitatif (wawancara & dokumentasi)	Implementasi kebijakan berjalan cukup baik, namun terkendala koordinasi lintas sektor dan keterbatasan SDM.
Roeslie, E. & Bachtiar, A.	Analisis Persiapan Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	2018	Deskriptif kualitatif	Kesiapan fasilitas kesehatan dan tenaga pelaksana menjadi faktor utama keberhasilan program gizi.
Leki, D. F. &	Implementasi Kebijakan	2024	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Nama	Judul	Tahun	Metode	Hasil
Hardianto, W. T.	Pemerintah Daerah Terkait Upaya Penanganan <i>Stunting</i> (Studi Kasus Di Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu)			implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Lasiolat belum berjalan optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meskipun pemerintah telah melakukan intervensi berupa penyuluhan gizi, PMT, dan penguatan posyandu, angka stunting justru mengalami peningkatan, sehingga diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah dan pendekatan multisektor yang lebih adaptif.

Nama	Judul	Tahun	Metode	Hasil
Febryanti, I., Indiati, I., & Pane, M. A.	Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Malang	2025	Kualitatif	Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kesiapan sekolah, dukungan pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat.
Rosidin, A. & Maulana, J.	Tantangan dan Strategi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Banten	2025	Studi kasus kualitatif	Strategi kolaboratif lintas sektor diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program gizi.
Wuisan, V. Z., Jaya, A., Sirante, Y., & Lambe, G. Z.	Analisis Kebijakan Kesiapan Pemda Kabupaten Mappi Papua Selatan Terhadap Program Makan Bergizi Gratis	2025	Kualitatif (wawancara mendalam, observasi, dokumentasi pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD)	Pemerintah Kabupaten Mappi belum siap secara anggaran dan infrastruktur untuk melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh. Ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat, kondisi geografis ekstrem (akses sungai), serta keterbatasan sarana- prasarana menyebabkan implementasi program

Nama	Judul	Tahun	Metode	Hasil
				belum optimal, meskipun partisipasi sekolah menunjukkan tren peningkatan.
Khatmawati, H., & Putri, Y. E.	Model Rantai Pasok Berkelanjutan pada Program Makan Bergizi Gratis Berbasis Pangan Lokal di Kabupaten Sumbawa	2026	Kualitatif studi kasus (wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi; analisis Miles & Huberman)	Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat ditentukan oleh keberlanjutan rantai pasok pangan lokal. Pemanfaatan pangan lokal mampu memperkuat peran petani dan UMKM, menekan biaya distribusi, meningkatkan ketahanan pangan daerah, serta mengurangi dampak lingkungan. Namun, tantangan utama meliputi keterbatasan kapasitas produksi, inkonsistensi pasokan, lemahnya infrastruktur logistik, dan

Nama	Judul	Tahun	Metode	Hasil
				koordinasi antarpemangku kepentingan. Studi ini menghasilkan model rantai pasok berkelanjutan yang mengintegrasikan pemerintah daerah, produsen pangan lokal, pengelola MBG, dan sekolah dalam satu sistem kolaboratif.
Rasyid, H., Masruri, G. G., Nugraha, H., & Hidayat, A.	Free Nutritious Meal Policy from the Perspective of Food Security, Education, and Social Justice	2025	Kualitatif studi pustaka dengan analisis kualitatif-kritis dan analisis kebijakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik multidimensi yang efektif dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi anak sekolah, memperkuat partisipasi dan kualitas pendidikan, serta mengurangi ketimpangan sosial. MBG juga berkontribusi pada

Nama	Judul	Tahun	Metode	Hasil
				penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan produsen pangan setempat. Namun, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kesiapan tata kelola, keberlanjutan pendanaan, dan koordinasi lintas sektor.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar studi memiliki persamaan dalam menyoroti implementasi kebijakan gizi dan pangan baik penanganan stunting sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah, dengan cenderung menggunakan pendekatan kualitatif dan fokus pada evaluasi pelaksanaan atau hasil kebijakan. Namun, perbedaannya terletak pada konteks wilayah, tingkat keberhasilan implementasi belum optimal akibat keterbatasan anggaran, infrastruktur, kondisi geografis, dan sosial ekonomi masyarakat. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menempatkan Kesiapan Pemerintah Daerah sebagai fokus utama analisis, bukan sekedar menilai keberhasilan atau kegagalan program, dengan meneliti secara mendalam aspek struktural, kultural, dan manajerial dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong sebagai Wilayah Timur Indonesia yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang kompleks. Selain itu, penelitian ini menutup

kesenjangan riset dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali proses, dan strategi adaptasi Pemerintah Daerah dalam menganalisa kebijakan Nasional ke konteks lokal, sehingga tidak hanya berkontribusi pada literatur kebijakan publik dan ketahanan pangan, tetapi juga memberikan pemahaman empiris mengenai dinamika desentralisasi kebijakan gizi di daerah terpencil yang masi relatif minim dikaji dalam penelitian sebelumnya.

2.3 Definisi Konseptual

2.3.1 Kesiapan Pemerintah Daerah

Kesiapan Pemerintah Daerah merupakan kondisi dan kapasitas institusional Pemerintah Daerah dalam merespons, mengadopsi, dan melaksanakan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat secara efektif dan berkelanjutan. Kesiapan ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyiapkan kerangka regulasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, serta mekanisme koordinasi lintas sektor guna mendukung implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.3.2 Program Asta Cita

Program Asta Cita merupakan kerangka visi dan agenda pembangunan nasional yang maju, mandiri, dan berkeadilan melalui delapan agenda strategi pembangunan. Asta Cita mencakup berbagai sektor prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pembangunan sumber daya manusia.

Dalam penelitian ini, Asta Cita dipahami sebagai arah kebijakan nasional yang menjadi dasar perumusan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, serta sebagai rujukan utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Konseptual Asta Cita dalam penelitian ini

menekankan pada sejauh mana visi dan agenda tersebut dipahami, diinternalisasi, dan diintegrasikan ke dalam kebijakan serta praktik pemerintah daerah Kabupaten Sorong.

2.3.3 Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan publik di bidang gizi dan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi bagi kelompok rentan, khususnya anak sekolah dan ibu hamil, sebagai upaya menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Dalam penelitian ini, program Makan Bergizi Gratis dipahami sebagai intervensi kebijakan lintas sektor yang melibatkan berbagai aktor pemerintahan dan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Konsep Makan Bergizi Gratis tidak hanya mencakup aspek penyediaan makanan, tetapi juga mencakup mekanisme perencanaan, distribusi, penentuan sasaran penerima manfaat, standar kualitas gizi, serta strategi adaptasi kebijakan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis Kabupaten Sorong.

2.4 Definisi Oprasional

Tabel 2. Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Pertanyaan
Kesiapan Pemerintah Daerah	Kesiapan regulasi dan kebijakan	1) Bagaimana kebijakan dan regulasi daerah mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong? 2) Apakah terdapat

Variabel	Indikator	Pertanyaan
		peraturan daerah, surat keputusan, atau pedoman teknis yang secara khusus mengatur pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong? 3.) Bagaimana agenda Asta Cita diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program daerah? 4) Apakah terdapat dokumen perencanaan daerah yang secara eksplisit mengintegrasikan agenda Asta Cita dengan Program Makan Bergizi Gratis?
	Kesiapan sumber daya manusia (SDM)	1) Bagaimana kesiapan aparatur pemerintah daerah (pendidikan, kesehatan, dan instansi terkait) dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis? 2) Apakah jumlah dan

Variabel	Indikator	Pertanyaan
		kompetensi SDM pelaksanaan suda memadai untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan? 3) Bagaimana keterlibatan dinas pendidikan, kesehatan, dan sektor lain dalam mendukung agenda Asta Cita?
	Kesiapan anggaran dan pendanaan	1) Bagaimana mekanisme penganggaran dan alokasi dana daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis? 2) Sejauh mana pemerintah daerah memiliki kemandirian dan keberlanjutan pendanaan dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis?
	Kesiapan infrastruktur dan	1) Bagaimana ketersediaan

Variabel	Indikator	Pertanyaan
	sarana pendukung	dan kesiapan sarana prasarana (dapur, distribusi makanan, fasilitas sekolah/kesehatan) dalam mendukung program? 2) Apa saja kendala infrastruktur yang di hadapi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong?

Variabel	Indikator	Pertanyaan
	Koordinasi dan tata kelola lintas sektor	1) Bagaimana bentuk koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan instansi terkait dalam pelaksanaan program? 2) Sejauh mana mekanisme koordinasi lintas sektor berjalan efektif dalam mendukung kelancaran Program Makan Bergizi Gratis? 3) Bagaimana peran kepemimpinan daerah dalam mengatasi hambatan dan mendorong keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis?

Variabel	Indikator	Pertanyaan
Implementasi Program Makan Bergizi Gratis	Mekanisme pelaksanaan program	1) 1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong, mulai dari perencanaan hingga distribusi? 2) Sejauh mana mekanisme tersebut telah disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial Kabupaten Sorong? 3) Bagaimana agenda Asta Cita diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program daerah? 4) Apakah terdapat dokumen perencanaan daerah yang secara eksplisit mengintegrasikan agenda Asta Cita dengan Program Makan Bergizi Gratis?

Variabel	Indikator	Pertanyaan
	Ketepatan sasaran penerima manfaat	1) Bagaimana penentuan sasaran penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis dilakukan di tingkat daerah? 2) Apakah terdapat kendala dalam memastikan bahwa penerima manfaat benar benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?
	Kualitas dan standar gizi makanan	1) Bagaimana standar kualitas dan kandungan gizi makanan yang disediakan dalam Program Makan Bergizi Gratis? 2) Bagaimana proses pengawasan kualitas dan keamanan makanan dalam pelaksanaan program tersebut? 3) Seberapa besar kontribusi MBG dalam menurunkan angka anemia dan stunting

Variabel	Indikator	Pertanyaan
		pada anak sekolah? 4) Bagaimana kecukupan kandungan gizi dalam menu MBG dibanding standar AKG nasional?
	Tantangan implementasi program	1) Apa saja tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis? 2) Bagaimana tantangan tersebut mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program di Kabupaten Sorong? 3.) Bagaimana sinkronisasi antara kebijakan nasional Asta Cita dengan kondisi dan kebutuhan lokal Kabupaten Sorong? 4) kendala apa saja yang di hadapi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan pusat dengan

Variabel	Indikator	Pertanyaan
		realitas lokal?
	Ketepatan sasaran penerima manfaat	1) Bagaimana penentuan sasaran penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis dilakukan di tingkat daerah? 2) Apakah terdapat kendala dalam memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?
	Kualitas dan standar gizi makanan	1) Bagaimana standar kualitas dan kandungan gizi makanan yang disediakan dalam Program Makan Bergizi Gratis? 2) Bagaimana proses pengawasan kualitas dan keamanan makanan dalam pelaksanaan program tersebut? 3) Seberapa besar kontribusi MBG dalam menurunkan

Variabel	Indikator	Pertanyaan
		angka anemia dan stunting pada anak sekolah? 4) Bagaimana kecukupan kandungan gizi dalam menu MBG dibanding standar AKG nasional?
	Tantangan implementasi program	1) Apa saja tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis? 2) Bagaimana tantangan tersebut mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program di Kabupaten Sorong? 3.) Bagaimana sinkronisasi antara kebijakan nasional Asta Cita dengan kondisi dan kebutuhan lokal Kabupaten Sorong? 4) kendala apa saja yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyelaraskan

Variabel	Indikator	Pertanyaan
		kebijakan pusat dengan realitas lokal?
	Strategi adaptasi kebijakan di tingkat lokal	1) Strategi apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk menyesuaikan Program Makan Bergizi Gratis dengan kondisi sosial dan geografis Kabupaten Sorong? 2) Bagaimana peran inovasi dan kearifan lokal dalam mendukung pelaksana Program Makan Bergizi Gratis? 3) Bagaimana program MBG dapat mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan? 4) Sejauh mana MBG berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani atau produsen lokal?

Variabel	Indikator	Pertanyaan
Program makan bergizi gratis	Mendorong pemberdayaan ekonmi lokal	1) Bagaimana program MBG dapat mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan? 2) Sejauh mana MBG berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani atau produsen lokal?
	Meningkatkan kualitas pendidikan	1) Apakah MBG berpengaruh terhadap peningkatan kehadiran dan prestasi belajar siswa? 2) Bagaimana MBG memepengaruhi tingkat konsentrasi dan partisipasi aktif siswa di kelas?
	Meningkatkan status gizi masyarakat	1) Seberapa besar kontribusi MBG dalam menurunkan angka anemia dan stunting pada anak sekolah? 2) Bagaimana kecukupan kandungan gizi dalam menu

Variabel	Indikator	Pertanyaan
		MBG dibanding standar AKG nasional? 3) Apakah makanan yang diberikan melalui Program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan kebutuhan gizi anak/anggota keluarga penerima manfaat?
Ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial	Ketahanan Pangan Rumah Tangga.	1) Apakah program MBG ini membantu kalian dalam hal pengeluaran atau uang jajan? 2) Apa perubahan yang terjadi pada ketersediaan bahan makanan di rumah sejak adanya Program MBG?
	Ketersediaan	1) Apakah sejak adanya Program Makan Bergizi Gratis, ketersediaan makanan bergizi di rumah tangga Anda menjadi lebih terjamin?
	Stabilitas	1) Apakah Program Makan

Variabel	Indikator	Pertanyaan
		Bergizi Gratis dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan tanpa gangguan distribusi? 2) Sejauh mana Program Makan Bergizi Gratis membantu menjaga kestabilan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu?
	AksesBilitas	1) Apakah Program Makan Bergizi Gratis membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan sehari-hari? 2) Apakah terdapat kendala akses (jarak, distribusi, administrasi, atau informasi) dalam memperoleh manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis?

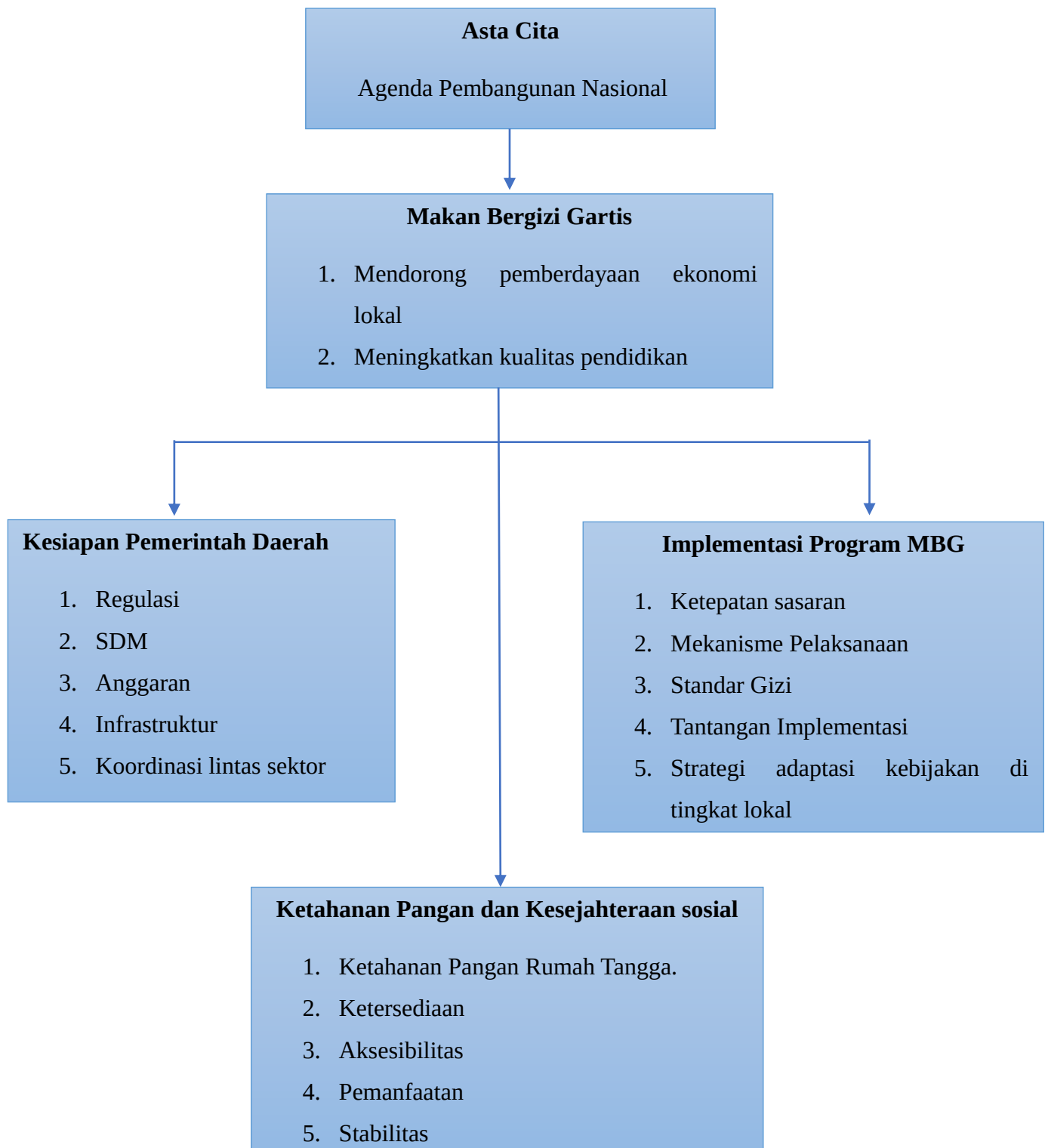
2.5 Kerangka Berpikir

Secara konseptual, kerangka berfikir penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh rancangan kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh kapasitas institusional dan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan program tersebut (Creswell & Poth, 2018).

Sehingga penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong sangat ditentukan oleh tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional Asta Cita ke dalam praktik kebijakan lokal. Secara teoritis, konsep *governance readiness* menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik membutuhkan kapasitas regulatif, administratif, dan institusioanl yang memadai (Clark, 1978; Oehmke, 2022). Tanpa kesiapan tersebut, kebijakan berpotensi menjadi simbolik dan tidak efektif.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, Edwards III menegaskan bahwa komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi. Studi kebijakan gizi menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi lintas sektor sering menjadi hambatan utama (WHO, 2021; Rasul & Neupane, 2021). Oleh karena itu, kesiapan pemerintah daerah menjadi prasyarat bagi implementasi yang efektif.

Lebih lanjut, dalam kerangka kebijakan pangan dan kesejahteraan sosial, Program Makan Bergizi Gratis dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga melalui pemenuhan akses pangan bergizi (FAO, 2008; Candel, 2014). Dengan demikian, penelitian ini menganalisis keterkaitan antara kesiapan pemerintah daerah, proses implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sorong.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, makna, serta dinamika sosial kelembagaan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sorong.

Menurut (Creswell, 2018), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap fenomena berdasarkan perspektif partisipan, bukan sekedar mengukur variabel secara kuantitatif. Oleh karena itu penelitian ini menggali bagaimana pemerintah daerah menafsirkan, menyiapkan, dan mengimplementasikan kebijakan Asta Cita Makan Bergizi Gratis di tingkat lokal.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, karena wilayah ini memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam dan merupakan representasi dari tantangan implementasi kebijakan nasional di daerah terpencil. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 6 bulan, mulai dari Desember hingga Mei 2026, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan akhir.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini merujuk pada seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan Program Asta Cita Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong. Menurut Creswell & Poth (2018), penelitian kualitatif tidak menekan jumlah populasi, tetapi lebih pada keterlibatan individu yang memiliki pengalaman serta pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini

menggunakan teknik *purposive sampling* dan dapat dikombinasikan dengan *snowball sampling* untuk memperoleh informan relevan.

Jumlah informan dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan sampai data mencapai tingkat kejenuhan dalam proses pengumpulan data (saturasi data). Diperkirakan jumlah informan dalam penelitian ini berkisar antara 10 hingga 15 orang, mencakup informan kunci, informan pendukung teknis, serta informan dari unsur masyarakat atau lembaga non-pemerintah. Struktur pemilihan informan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai kesiapan pemerintah.

- a) Objek Penelitian; Pemerintah Kabupaten Sorong dan pihak terkait yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Asta Cita Makan Bergizi Gratis. Khususnya terkait kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program tersebut.
- b) Subjek Penelitian; Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, Sekertaris daerah, Staf bidang gizi, pelaksana program MBG, koordinator lapangan bagian keuangan program, Tokoh masyarakat, pendamping lapangan, anggota LSM lokal.

Tabel 3 Subjek Penelitian

No	Kategori Informan	Jumlah	Jabatan
1.	Informan Kunci	4-5 Orang	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Bapperida
2.	Informan Pendukung Teknis	3-4 Orang	Siswapenerima manfaat, Kepala

No	Kategori Informan	Jumlah	Jabatan
			Sekolah SMA NEGERI 2 Kabupaten Sorong

3.4 Teknik Pengumpulam Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Penggunaan kedua sumber data tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam, serta meningkatkan validitas hasil penelitian melalui triangulasi data.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penelitian dari sumber pertama di lapangan, tanpa perantara pihak lain. Data ini dkumpulkan secara langsung melalui interaksi peneliti dengan subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui:

1. Wawancara mendalam (*In Depth Interview*); Digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan strategi aktor kebijakan di lapangan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar informan dapat memberikan jawaban terbuka dan reflektif.
2. Observasi lapangan; Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di sekolah (SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong) dan kantor pemerintahan, termasuk proses distribusi makanan.
3. Dokumentasi peristiwa; Digunakan pada proses pencatatan atau perekaman suatu kejadian yang sedang atau telah terjadi secara langsung. Tujuannya adalah menyimpan bukti atau rekam jejak suatu kegiatan. Dengan cara peneliti merekam wawancara, video acara, dan foto kegiatan.

Data primer digunakan untuk menggali secara mendalam kesiapan daerah, baik dari aspek kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran hingga sarana prasarana.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan melalui dokumen, arsip, laporan, dan sumber tertulis lain yang telah tersedia sebelumnya. Data sekunder berfungsi untuk melengkapi, memperkuat, dan memverifikasi data primer.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari:

1. Studi dokumentasi; Meliputi pengamatan terhadap dokumen resmi seperti peraturan, laporan pelaksanaan, data statistik/profil daerah, dan publikasi akademik yang relevan dengan Program Makan Bergizi Gratis dan Asta Cita.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga penyusunan laporan penelitian. Model Miles dan Huberman (1994), yang menekankan bahwa proses analisis data kualitatif berlangsung secara siklus dan terus-menerus. Analisis data tersebut meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyaring, mengelompokkan, dan menyederhanakan, serta mengabstraksikan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini penelitian menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu kesiapan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam penerapan Program Asta Cita Makan Bergizi Gratis.

Kegiatan reduksi data dilakukan dengan cara, Mengelompokkan data berdasarkan tema dan indikator kesiapan pemerintah (kebijakan, kelembagaan, SDM, anggaran, sarana dan sistem pelaksanaan), Mengkode (coding) hasil wawancara dan catatan lapangan, dan meringkas pernyataan informan tanpa menghilangkan makna substansial.

Sehingga reduksi data bertujuan agar data yang dianalisis menjadi lebih terfokus, terorganisir, dan mudah dipahami, sehingga memudahkan peneliti dalam analisis selanjutnya.

b) Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses menyusun dan menyajikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga memungkinkan peneliti untuk melihat pola, hubungan, dan kecenderungan antar data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk, Uraian naratif atau deskriptif, tabel dan matriks, dan bagan atau peta konsep sederhana.

Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami kondisi kesiapan pemerintah daerah, membandingkan temuan antar informan, serta mengidentifikasi keterkaitan antar aspek kesiapan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan penyajian data yang sistematis, penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara lebih akurat dan logis.

c) Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*):

Tahap penarikan dan verifikasi kesimpulan merupakan proses merumuskan makna, pola, hubungan sebab-akibat, dan interpretasi makna dari data yang telah terkumpulkan. Kesimpulan awal yang diperoleh tidak bersifat final, melainkan terus diverifikasi melalui, Perbandingan antar sumber data (triangulasi sumber), Perbandingan antar teknik pengumpulan data (triangulasi teknik), Peninjauan kembali data lapangan dan dokumen pendukung.

Sehingga erifikasi kesimpulan dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian bersifat kredibel, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil akhir dari tahap ini berupa kesimpulan yang menggambarkan tingkat kesiapan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan Program Asta Cita Makan Bergizi Gratis beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kabupaten Sorong

Kabupaten Sorong merupakan salah satu daerah yang berada di Pulau Papua dan menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat Daya. Pada mulanya terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong adalah salah satu daerah yang menjadi pendiri provinsi ini dimana dikenal sebagai induk.

Kabupaten Sorong merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Papua Barat Daya yang memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan di kawasan Timur Indoneisa. Secara geografis, Kabupaten Sorong memiliki wilayah yang luas dengan kondisi topografi yang beragam, mulai dari daerah pesisir, daratan rendah, hingga wilayah perbukitan. Kondisi geografis tersebut berimplikasi langsung terhadap penyediaan dan pemerataan layanan publik, khusus di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Secara astronomis, Kabupaten Sorong sendiri terletak antara 00°33'42" Lintang Utara dan 01°35'29" Lintang Selatan, dan 130°40'49" Bujur Timur. Mengacu pada letak geografisnya, Kabupaten Sorong mempunyai batas-batas yakni Utara-Samudra Pasifik dan Selat Dampir; Selat-Laut Seram; Timur-Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong Selatan; Barat-Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Laut Seram.

Dari aspek sosial ekonomi, masyarakat Kabupaten Sorong memiliki tingkat kesejahteraan yang bervariasi, dengan sebagian wilayah masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan yang merata, pelayanan kesehatan yang belum optimal, serta masih adanya persoalan terkait pemenuhan gizi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia masih

sangat dibutuhkan, terutama melalui program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat (Ningrum, 2024). Dengan demikian, Kabupaten Sorong menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasi program strategi, seperti Program Makan Bergizi Gratis.

4.1.2 Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak usia sekolah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan secara resmi oleh Pemerintah pada tanggal 6 Januari 2025 sebagai satu program prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-4 yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia Indonesia. Program ini dirancang sebagai intervensi kebijakan lintas sektor yang bertujuan menyediakan akses makanan bergizi anak usia sekolah dan ibu hamil guna menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045 (Kemenkeu, 2025). Program Makan Bergizi Gratis juga memiliki visi untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing melalui pemenuhan gizi yang merata dan berkelanjutan. Adapun misi program ini meliputi peningkatan akses pangan bergizi bagi kelompok rentan, penguatan edukasi pola hidup sehat, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.

(Liputan6.com,2025) Secara teknis, pelaksana Program Makan Bergizi dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui mekanisme Satuan pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas mengelola dapur produksi makanan dan mendistribusikan ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Setiap SPPG memiliki tenaga ahli gizi yang diangkat langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga Pemerintah Daerah

tidak memiliki kewenangan teknis penuh atas pelaksana program ini. Kondisi tersebut menciptakan struktur implementasi yang bersifat terpusat secara teknis, namun tetap membutuhkan dukungan koordinatif dan Pemerintah daerah dalam aspek pendataan, fasilitasi, pengawasan lapangan, serta penyediaan sarana pendukung program.

Di Kabupaten Sorong, Program Makan Bergizi Gratis mulai berjalan pada awal tahun 2025 dengan jangkauan yang masih terbatas pada beberapa sekolah diwilayah yang relatif muda diakses. Sementara itu, wilayah-wilayah pedalaman masih berada dalam tahap persiapan, termasuk pembangunan dapur Satuan pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang direncanakan di kawasan seperti klamono dan beberapa distrik terpencil lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong masih dilakukan secara bertahap dan belum merata secara geografis. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan program di daerah sangat dipengaruhi oleh kesiapan Infrastruktur, koordinasi antarinstansi, ketersediaan sumber daya pendukung, serta kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjembatani kebijakan pusat dengan kondisi riil masyarakat setempat.

4.1.3 Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong

A. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong

Tugas Pokok Dinas pendidikan kabupaten Sorong adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas ini menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, koordinasi penyediaan infrastruktur pendidikan, penyelenggaraan pelayanan umum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan.

Selain itu, dinas juga menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan pelaksanaan program, serta mendukung penyusunan standar operasional prosedur dan peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan.

B. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong

1. Visi

Terwujudnya masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan prima

2. Misi

- a. meningkatkan kapasitas layanan pendidikan
- b. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan
- c. Meningkatkan daya saing pada semua jenjang pendidikan
- d. Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan

4.1.4 Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong

Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Tugas utama di dinas ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program kesehatan masyarakat, termasuk program gizi. Dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis, Dinas Kesehatan memiliki peran strategi dalam memastikan kualitas dan standar gizi makanan yang diberikan kepada penerima program. Peran tersebut mencakup penentuan standar menu makanan bergizi, pengawasan keamanan pangan, serta monitoring dampak program terhadap status gizi masyarakat.

Selain itu, Dinas kesehatan juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat. Hal ini sejalan dengan

upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan gizi yang masih menjadi tantangan di wilayah Sorong dan sekitarnya (Kalampung & Muhibuddin, 2025).

A. Sejarah Perjalanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong

Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong didirikan untuk tujuan untuk memperbaiki akses dan mutu layanan medis masyarakat di daerah tersebut. Mulai pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong berfokus pada pemberian pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan berbagai penyakit, serta promosi kesehatan masyarakat sesuai sejalan kebutuhan komunitas setempat. Perkembangan Dinkes ini sejalan seiring meningkatnya pengetahuan masyarakat akan signifikansinya kesehatan. Ini memperlihatkan upaya pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan yang memadai.

Seiring dalam bertambahnya populasi dan pergeseran situasi masyarakat, Dinkes Kabupaten Sorong terus menyesuaikan diri untuk menjawab tantangan yang baru di sektor medis. Mereka tidak hanya berfungsi di memberi pelayanan kesehatan di puskesmas dan RS, tetapi juga aktif dalam kampanye kesehatan masyarakat dan kegiatan vaksinasi. Ini membuktikan komitmen Dinkes untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup di Kabupaten Sorong.

Dalam perjalanan itu, Dinkes Kabupaten Sorong juga menjalankan berbagai terobosan dan kerja sama bersama banyak pihak. Usaha tersebut mencakup kolaborasi bersama lembaga non-pemerintah, institusi pendidikan, serta bagian swasta dalam rangka memperkuat jaringan kesehatan pada lokasi tersebut. Dengan semua upaya ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong berupaya merealisasikan visi organisasi mereka sebagai layanan kesehatan unggulan yang kuat memenuhi permintaan masyarakat yang terus berkembang.

B. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong adalah menghadirkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri melalui layanan kesehatan yang berkualitas. Dinkes bertekad untuk memajukan taraf kesehatan masyarakat dengan memberikan jalur yang mudah dan setara terhadap sarana kesehatan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya merawat kesehatan.

C. Tujuan dan Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong

Tujuan strategis Dinkes terdiri dari beberapa aspek penting yakni:

1. meningkatkan standar pelayanan kesehatan melalui implementasi standar pelayanan yang profesional dan profesional.
2. Memperbesar pengetahuan masyarakat tentang kesehatan lewat berbagai program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara rutin.
3. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan sumber daya dan dukungan dalam pelayanan kesehatan.

4.1.5 Bapperida (Bappeda) Kabupaten Sorong

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah (Bapperida) Kabupaten Sorong merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Bapperida bertugas menyusun rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta mengoordinasikan perencanaan program antar perangkat daerah. Dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis, Bapperida berperan sebagai koordinator utama dalam proses perencanaan dan penganggaran program tersebut terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Peran Bapperida juga mencakup monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, guna memastikan bahwa program berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian,

keberadaan Bapperida sangat penting dalam mendukung sinergi antar sektor, khususnya antara Dinas Pendidikan dan dinas Kesehatan, dalam pelaksanaan program.

A. Visi dan Misi Bapperida Kabupaten Sorong

1. Visi

Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat dan Sejahtera

2. Misi

- a. Membangun infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi pedesaan dan perkotaan.
- b. Mengembangkan SDM yang cerdas dan sehat yang memiliki daya saing tinggi.
- c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d. Menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat secara berkelanjutan.

4.1.6 Profil SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong

SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong merupakan salah satu sekolah jenjang SMA berstatus Negeri yang berada di wilayah Kec. Aimas, Kab. Sorong, Papua Barat. SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong didirikan pada tanggal 29 November 2012 dengan Nomor SK Pendirian 420/2012/2012 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kegiatan pembelajaran, sekolah yang memiliki 867 siswa ini dibimbing oleh 55 guru yang profesional di bidangnya. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong saat ini adalah Fice Loppies. Operator yang bertanggung jawab adalah Moh. Farid La Aca.

Dengan adanya keberadaan SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa di wilayah Kec. Aimas, Kab. Sorong. SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong merupakan salah satu lembaga pendidikan

menengah atas negeri yang berada di wilayah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Sekolah ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan formal pada jenjang menengah, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Sebagai institusi pendidikan, SMA Negeri 2 kabupaten Sorong menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, sekolah ini juga berfungsi sebagai wadah pengembangan potensi peserta didik, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Dalam pelaksanaannya, sekolah didukung oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki tanggung jawab dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan kondusif.

Dari segi sarana dan prasarana, SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong telah dilengkapi dengan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya. Namun demikian, sebagai sekolah yang berada di wilayah dengan karakteristik geografis tertentu, masih terdapat tantangan dalam pemenuhan dan pemerataan fasilitas pendidikan secara optimal. Dalam konteks penelitian, SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong menjadi lokasi yang relevan karena merupakan salah satu sekolah yang berpotensi menjadi sasaran implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Keberadaan program tersebut di lingkungan sekolah diharapkan dapat mendukung peningkatan status gizi peserta didik, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi belajar dan prestasi akademik siswa.

Selain itu, keterlibatan pihak sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program. Sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat pelaksanaan program, tetapi juga mediator dalam membangun kesadaran siswa mengenai pentingnya pola makanan sehat dan gizi seimbang. Dengan demikian, SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong menjadi objek yang strategis dalam mengkaji sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam

mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya pada tingkat satuan pendidikan menengah.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

Kesiapan Pemerintah Daerah dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam menyiapkan seluruh aspek yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, anggaran, infrastuktur, maupun koordinasi antar instansi agar tujuan dapat tercapai secara efektif. Menurut Fauzia, Haliah, dan Hapsari (2026), kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis tercermin melalui kemampuan pemerintah daerah dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kesiapan sumber daya, serta kapasitas kelembagaan dalam menjalankan kebijakan publik di tingkat lokal. Dengan demikian, kesiapan daerah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi program Makan Bergizi Gratis.

Kesiapan Pemerintah daerah Kabupaten Sorong dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dianalisis melalui beberapa aspek utama. Berdasarkan hasil wawancara, secara umum Pemerintah Daerah menunjukkan adanya kesiapan awal, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dalam pelaksanaannya.

A. Kesiapan regulasi dan kelembagaan

Kesiapan regulasi dan kelembagaan merupakan aspek mendasar dalam menentukan keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sorong. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, kesiapan kelembagaan tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan formal, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam

membangun koordinasi lintas sektor, membentuk struktur pelaksana, serta mengintegrasikan program ke dalam dokumen perencanaan daerah. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong menunjukkan adanya upaya awal dalam mendukung implementasi Program MBG melalui koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pembentukan tim koordinasi, serta penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah. Meskipun program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan nasional, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kesiapan implementasi di tingkat lokal.

Berdasarkan temuan penelitian, kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan kondisi yang cukup siap secara struktural dan koordinatif, namun masih terbatas pada aspek teknis operasional dan kemandirian sumber daya. Pemerintah Kabupaten Sorong telah membentuk struktur khusus berupa Satuan Tugas (satgas) untuk mendukung implementasi program. Pembentukan Satgas ini menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam merespon kebijakan nasional.

1. Pembentukan satgas dan tim koordinasi

Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong telah membangun fondasi kesiapan struktural dan kelembagaan dengan membentuk tim koordinasi dan satuan tugas (satgas) dalam mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Pembentukan satgas ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar instansi, memperjelas pembagian tugas, serta memastikan program dapat berjalan secara terintegrasi. Keberadaan satgas dinilai penting karena implementasi Program Makan Bergizi Gratis melibatkan berbagai sektor, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, pangan, hingga pengawasan distribusi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah

melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta instansi pendukung lainnya mulai melakukan komunikasi dan koordinasi teknis terkait mekanisme pelaksanaan program. Indikator paling nyata dari kesiapan ini adalah Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah secara lintas sektor, dipimpin oleh wakil Bupati, dan melibatkan unsur TNI serta Polri.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan oleh Bpk Andreas Taa, S.Ag. Selaku Kepala Dinas Pendidikan, sebagai berikut

Di Pemerintah Kabupaten Sorong ini kami untuk mendukung program ini sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang diketuai langsung oleh Wakil Bupati, bersama TNI/ Polri dan juga beberapa instansi yang terbagung dalam tim satgas. Terkait koordinasi antar organisasi perangkat daerah ini pada awalnya kami mengalami banyak kendala tetapi semakin lama tingkat koordinasi kami semakin baik karena tim kami dari dinas pendidikan juga masuk dalam tim satgas tersebut. (wawancara pada 17 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat komitmen politik yang cukup kuat dari pimpinan daerah untuk mendukung program ini. Keterlibatan Wakil Bupati sebagai ketua satgas menandai adanya dukungan dari level tertinggi pemerintah lokal, yang menurut Edwards III (1980) merupakan salah satu faktor disposisi yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Sehingga keberadaan Satgas ini memperlihatkan bahwa kesiapan struktural telah dibangun melalui pendekatan kolaboratif lintas instansi. Selain itu, berdasarkan data dari Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia, Implementasi Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan sinergi lintas sektor guna memastikan ketepatan sasaran, kualitas gizi, serta keberlanjutan distribusi makanan bagi peserta didik dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Pemerintah daerah diposisikan sebagai aktor strategis dalam mendukung keberhasilan implementasi program di tingkat lokal.

2. Integrasi program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Hasil penelitian juga memnunjukkan bahwa kesiapan regulasi daerah mulai diarahkan pada penyesuaian dokumen Perencanaan Pemebangunan Daerah (RPJMD), termasuk integrasi program prioritas nasional ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Integrasi tersebut penting agar Program Makan Bergizi Gratis memperoleh legitimasi kebijakan, dukungan anggaran, serta keberlanjutan pelaksanaan di tingkat daerah.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, integrasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Rencana Pembangunan Daerah menjadi bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Hal ini menjadi bukti kesiapan kelembagaan yang signifikan.

Hal ini di sampaikan oleh Bpk Julian Romeo Golkar, S.I.P., M.M, selaku Sub Riset dan Inovasi Bapperida, sebagai berikut:

Iya tentu saja program tersebut masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah. Kami memiliki tim khusus untuk program tersebut dan sejauh ini suda berjalan lancar dan kami selalu berkoordinasi dengan dinas terkait yakni dinas pendidikan. Sehingga kami juga mengetahui terkait jumlah SPPG yang suda di bangun dan yang masih progres pembangunan serta jumlah penerima manfaat. Selain itu, Pemerintah daerah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang terdiri dari gabungan berbagai OPD. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) juga menjadi indikator adanya kesiapan kelembagaan. (wawancara Pada13 April 2026).

Mengintegrasikan program ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan indikator penting yang menandakan bahwa Makan Bergizi Gratis bukan sekedar kebijakan responsif, melainkan telah diakui sebagai prioritas pembangunan daerah yang memerlukan perencanaan sistematis. Selain itu, secara konseptual, Grindle (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konteks implementasi, termasuk dukungan institusi dan kesesuaian kebijakan dengan kondisi daerah. Oleh karena itu, integrasi program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi langkah penting untuk memperkuat legitimasi dan arah implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong.

B. Kesiapan sumber daya manusia

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sorong. Implementasi program ini membutuhkan tenaga pelaksana yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan, gizi, administrasi, serta koordinasi teknis lintas sektor.

penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) di tingkat daerah lebih berperan sebagai fasilitator dan koordinator, sementara pelaksanaan teknis utama berada pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas sumber daya (SDM) lokal dalam implementasi program masih perlu diperkuat, khususnya dalam bidang teknis pengelolaan gizi dan distribusi pangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong memiliki peran penting dalam mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis, terutama

pada aspek pengawasan kualitas gizi, kesehatan penerima manfaat, serta edukasi terkait pola makan sehat. Dinas Kesehatan juga berperan dalam memberikan pendampingan teknis mengenai standar makanan bergizi, keamanan pangan, serta pemantauan kondisi kesehatan peserta didik sebagai kelompok sasaran program. Selain itu, keterlibatan puskesmas dan tenaga kesehatan di tingkat distrik menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar kesehatan yang ditetapkan. Pemerintah daerah menilai bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada distribusi makanan, tetapi juga pada kualitas gizi dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Hal ini terlihat dari pernyataan Bpk dr. Ronney Ch.N. Kalesaran selaku Kepala Dinas Kesehatan, sebagai berikut:

Secara juknis, peran kami memang belum terlalu spesifik, namun kami membantu dalam mengawal pelaksanaan dan memberikan data sasaran akurat. Selain itu, pelaksanaan teknis sepenuhnya berada pada SPPG. Jika memang kami dibutuhkan maka akan diberitahu untuk terjun langsung dalam misalnya penentuan gizi atau dari SPPG membutuhkan data-data ibu hamil dan balita. (wawancara pada 17 April 2026).

Pernyataan ini secara eksplisit menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat kebijakan yang mengharuskan keterlibatan penuh Pemerintah Daerah dan realitas kapasitas teknis yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Kepala Dinas Kesehatan Bpk dr. Ronney Ch.N. Kalesaran menambahkan:

Pelaksana teknis adalah SPPG, setiap SPPG memiliki gizi tersendiri yang di angkat oleh Badan Gizi Nasional. Akan tetapi tugas kami disini sebagai pengawasan atau bisa dibilang pendamping terkait teknis mengenai standar makanan gizi, keamanan pangan, serta kami juga memantau kondisi kesehatan peserta didik sebagai kelompok sasaran program. Sehingga kami jika dibutuhkan kami selalu siap. (wawancara pada 17 April 2026).

Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, intervensi gizi melalui pemberian makanan sehat dan bergizi merupakan salah satu strategi penting dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak usia sekolah. Oleh karena itu, peran Dinas Kesehatan menjadi sangat strategis dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan struktural terhadap aktor eksternal (pusat), yang berimplikasi pada rendahnya otonomi daerah dalam mengendalikan kualitas implementasi. Dalam perspektif implementasi kebijakan, hal ini berpotensi menimbulkan *implementation gap*, yakni jurang antara desain kebijakan yang ideal dan kemampuan aktual aktor daerah dalam mengimplementasikannya (Press & Wildavsky, dalam Edwards III, 1980). Ketika aktor lokal tidak memiliki kontrol langsung terhadap variabel-variabel teknis yang justru menentukan keberhasilan program, maka kemampuan mereka untuk merespons permasalahan lapangan secara cepat dan efektif menjadi sangat terbatas.

Meskipun demikian, kontribusi Sumber Daya Manusia daerah dalam penyediaan dan validasi data siswa tidak dapat diabaikan. Sehingga Dinas Pendidikan juga berperan dalam menyiapkan data siswa sebagai dasar perencanaan program.

Hal ini disampaikan oleh Bpk Andreas Taa, S.Ag. Selaku Kepala Dinas Pendidikan yakni:

Sejauh ini kami dari Dinas Pendidikan itu lebih banyak menyiapkan data-data siswa yang dibutuhkan oleh tim Satgas maupun pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. contohnya pada saat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mau membuat dapur baru mereka memerlukan data-data siswa, sehingga pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghubungi kami untuk meminta data-data siswa tersebut. (wawancara pada 17 April 2026).

Novelty dari temuan penelitian ini adalah bahwa ketergantungan pada Sumber Daya Manusia pusat (SPPG/BGN) tidak sekedar persoalan kompetensi, melainkan merupakan

desain program secara sistematis membatasi otonomi daerah dalam mengelola program sosial strategi.

C. Kesiapan anggaran dan pendanaan

Kesiapan anggaran dan pendanaan menjadi salah satu aspek penting dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sorong. Berdasarkan hasil penelitian, sumber pendanaan utama Program MBG berasal dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN), sedangkan pemerintah daerah berperan dalam mendukung koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan pelaksanaan program di daerah. Dana tersebut disalurkan langsung kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana teknis di lapangan. Dengan demikian, peran Pemerintah Daerah dalam aspek pendanaan lebih bersifat mendukung dan memfasilitasi, bukan sebagai pengelola utama anggaran program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bapperida Kabupaten Sorong dijelaskan bahwa pemerintah daerah tidak secara langsung mengelola anggaran utama program, karena pembiayaan operasional program telah diatur oleh pemerintah pusat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional. Hal ini di konfirmasi secara konsisten oleh dua informan yang berbeda.

Sebagaimana disampaikan oleh Bpk Julian Romeo Golkar, S.I.P., M.M., selaku Sub Riset dan Inovasi Bapperida, sebagai berikut:

Pendanaan utama program berasal dari Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, sedangkan pemerintah daerah lebih pada dukungan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program. Jadi pemerintah daerah tidak menegluarkan anggaran daerah. (wawancara pada 13 April 2026).

Serta diperkuat juga oleh Bpk dr. Ronney Ch.N. Kalesaran selaku Kepala Dinas Kesehatan, sebagai berikut:

Semua dana oprasional Makan Bergisi Gratis ini langsung dari Badan Gizi Nasional (Pusat), sehingga tidak ada pengeluaran dari anggaran daerah yang di keluargakan oleh pemerintah daerah. Jadi tugas kami hanya sebagai pengawasan, fasilitator, dan dinas kesehatan adalah tugasnya di bagian pemeriksaan kesehatan atau gizi penerima manfaat. (wawancara pada 17 April) 2026).

Konsistensi pernyataan kedua informan dari oraganisasi perangkat daerah (OPD) yang berbeda memperkuat validitas temuan ini secara signifikan. Secara teoritik, kondisi ini mencerminkan fenomena yang dalam literatur desentralisasi fiskal sebagai *vertical fiscal imbalance*, yaitu ketidakseimbangan antara kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah dengan kapasitas fiskal yang tersedia untuk mendukungnya (Mwangi, 2024).

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dengan pandangan yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal seharusnya memberikan ruang yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola program sosial berdasarkan kebutuhan dan karakteristik lokal (Candel, 2014; FAO, 2008). Pada implementasi Program makan Bergisi Gratis di Kabupaten Sorong, bentuk desentralisasi yang terjadi lebih administratif, sementara kewenangan fiskal masih sangat terbatas. Akibatnya, Pemerintah daerah cenderung hanya berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan pusat, belum sepenuhnya menjadi aktor strategis yang mampu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat lokal dalam proses implementasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan fiskal daerah masih rendah dan bersifat independen terhadap pusat. Dalam perspektif teori kebijakan publik, hal ini menunjukkan belum optimalnya desentralisasi fiskal dalam implementasi program sosial.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Sorong tetap memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data, koordinasi lintas sektor, dukungan sarana pendukung, serta keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah dalam mendukung kelancaran implementasi program. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tetap memiliki

tanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif meskipun sumber anggaran utama berasal dari pemerintah pusat.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (2024), Program MBG merupakan program prioritas nasional yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema pelaksanaan Badan Gizi Nasional dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di daerah. Pemerintah Daerah berperan dalam mendukung kesiapan implementasi, pengawasan, dan penyediaan data sasaran penerima manfaat.

D. Kesiapan Infrastruktur dan Sarana Pendukung

Kesiapan infrastruktur dan sarana pendukung menjadi salah satu aspek penting dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sorong. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah bersama pelaksana program telah menyiapkan beberapa fasilitas pendukung seperti dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, tempat penyimpanan makanan, serta sarana distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong dijelaskan bahwa pembangunan dapur dilakukan menyesuaikan kondisi geografis wilayah, terutama di daerah pedalaman.

Sebagaimana di sampaikan oleh Bpk Andreas Taa, S.Ag. Selaku Kepala Dinas Pendidikan, yakni:

Di daerah-daerah pedalaman itu pembangunan dapur dilakukan di area sekolah untuk memudahkan penyajian makanan yang masih segar dan bisa langsung dinikmati pada saat makanannya hangat. Tetapi sebagian dapur di pedalaman masih dalam proses pembangunan dapurnya. (wawancara pada 17 April 2026).

Selain itu, sekolah juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa tempat penyimpanan sementara sebelum makanan dibagikan kepada siswa.

Sebagaimana disampaikan oleh Bpk I Ketut Widura, M. Pd. Selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong sebagai Berikut

Setelah kami mengetahui sekolah kami juga akan jadi salah satu penerima manfaat, Sekolah kami menyiapkan atau suda menyiapkan ruang penyimpanan sementara untuk makanan sebelum didistribusikan kepada para siswa untuk menikmatinya. (wawancara pada 22 April 2026).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana pendukung program masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam armada distribusi makanan. Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa keterlambatan distribusi masih sering terjadi akibat keterbatasan kendaraan pengangkut makanan dan jarak antar sekolah yang cukup jauh. Kondisi geografis Kabupaten Sorong yang memiliki wilayah pedalaman dan akses transportasi terbatas menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung kelancaran distribusi makanan.

Dari aspek infrastuktur, masih terdapat keterbatasan yang cukup signifikan, terutama terkait sarana distribusi makanan yakni kapasitas dapur, kendaraan pengantaran, serta akses ke wilayah pedalaman. Kondisi geografis Kabupaten Sorong yang sangat kompleks sehingga menjadi faktor utama penghambat pemerataan layanan Program Makan Bergizi Gratis.

Hal ini disampaikan juga oleh Bpk Andreas Taa, S.Ag. Selaku Kepala Dinas Pendidikan;

Sejauh ini masalah teknis yang kami hadapi, tantangan dalam menjaga sterilisasi alat makan, memastikan daging dimasak hingga matang sempurna, sertamenangani alergi pada siswa tertentu. Kemudian terkait geografis yang sulit menjangkau daerah-daerah pedalaman (Seperti klamono) yang saat ini infrastuktur dapurnya masih dalam tahap pembangunan. Salah satu kendala yang besar yang kami hadapi disini terkait banyaknya penerima manfaat sekirat 3.377 siswa atau peserta didik yang menerima makanan dari 1 SPPG, terkait dapur itu kami suda komunikasikan dengan pihak SSPG dan kami belum tau tindak lanjutannya bagaimana. Beda dengan

pedalam, kalau di pedalaman siswanya sedikit hingga penerima manfaat tidak sebanyak di kota sini. (wawancara pada 17 April 2026).

Pernyataan ini mengungkapkan dua lapisan permasalahan infrastuktur yang berbeda namun saling berkaitan: pertama, permasalahan teknis sanitasi dan keamanan pangan di level mikro; dan kedua, permasalahan aksesibilitas geografis di level makro. Keduanya secara bersama-sama menghambat kualitas dan pemerataan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis. Hambatan yang lebih langsung dirasakan oleh penerima manfaat adalah keterlambatan distribusi makanan akibat keterbatasan armada pengiriman.

Hal ini disampaikan oleh Bpk I Ketut Widura, S.Pd., M. Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong sebagai Berikut:

Kendala utama yang kami rasakan disini adalah pengantaran yang kurang tepat waktu, sering kami tanyakan alasan yang mereka sampaikan bahwa mobil pengantarannya hanya satu, sementara yang di antar mungkin titiknya banyak sehingga kadangkala waktunya lewat padahal kita maunya disini mereka antar pada jam istirahat, sehingga sulit sekali dapat istirahat sehingga mengganggu jam pelajaran juga. Hal ini mengganggu proses belajar mengajar. (wawancara pada 22 April 2026).

Hambatan ini juga dikonfirmasi langsung oleh para siswa sebagai penerima manfaat, yang merupakan kelompok yang paling berhak mendapatkan manfaat optimal dari program tersebut.

Hal ini disampaikan juga oleh Violita Mutiara Gimon siswa SMA Negeri 2 kabupaten Sorong:

Sering terlambat untuk pengantaran makanan. Kadang makananya baru datang pada saat kami suda mau pulang sekolah dan juga kadang sampai setelah kami suda selesai istirahat sehingga harus menunggu jam pelajaran selesai. (wawancara pada 22 April 2026).

Triangulasi antara pernyataan kepala sekolah dan siswa menunjukkan adanya bukti empiris yang memperkuat bahwa kendala distribusi makanan bukan sekedar persoalan administratif atau birokrasi, tetapi merupakan masalah nyata yang berdampak langsung terhadap kualitas pelaksanaan program. Keterlambatan distribusi menyebabkan makanan diterima setelah kegiatan belajar selesai, sehingga fungsi program sebagai upaya mendukung konsentrasi dan pemenuhan kebutuhan gizi siswa selama proses pembelajaran menjadi kurang optimal. Selain itu, lamanya waktu penyimpanan sebelum makanan dikonsumsi juga berpotensi menurunkan kualitas dan kandungan gizi makanan yang diberikan.

Efektivitas distribusi program juga sangat dipengaruhi oleh jumlah dan persebaran dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketersediaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih terbatas menyebabkan cakupan layanan menjadi terlalu luas untuk ditangani oleh satu titik produksi, sehingga jarak tempuh distribusi semakin panjang dan waktu pengiriman menjadi lebih lama. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas makanan yang diterima, terutama dari aspek kesegaran, keamanan pangan, dan ketepatan waktu penyajian. Oleh karena itu, penambahan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar secara lebih merata menjadi kebutuhan strategis untuk mendekatkan lokasi produksi dengan penerima manfaat. Dengan semakin banyaknya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah, beban distribusi dapat dibagi secara lebih proporsional, kebutuhan armada pengiriman dapat ditekan, serta efisiensi operasional program dapat meningkat. Langkah ini juga penting untuk menjangkau daerah terpencil dan wilayah dengan akses transportasi yang terbatas, sehingga tujuan pemerataan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis dapat tercapai secara lebih optimal.

Berdasarkan data Badan Gizi nasional (2025), pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sorong telah menjangkau penerima manfaat dalam jumlah

yang cukup besar. Tercatat sebanyak 10.249 penerima manfaat yang terdiri dari 9.839 peserta didik, 410 ribu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan cakupan layanan pada 49 sekolah dan 2 posyandu. Selain itu, program ini didukung oleh beberapa Satuan pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah Kabupaten Sorong, seperti Satuan pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sorong Klamasen, Sorong Mariat, Sorong Malaweale, dan Sorong klasuluk. Data tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Makan bergizi Gratis di kabupaten Sorong telah berjalan dan mampu menjangkau kelompok sasaran yang menjadi prioritas pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik dan kelompok rentan. (BGN, 2025).

Disisi lain, Badan Gizi nasional juga menunjukkan adanya upaya perluasan layanan melalui pembangunan Satuan pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa wilayah terpencil di Kabupaten Sorong. Terdapat 25 lokasi pembangunan Satuan pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpencil yang sedang diproses guna memperluas jangkauan pelayanan program. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program saat ini, tetapi juga berupaya memperkuat infrastruktur pendukung agar distribusi makanan bergizi dapat menjangkau daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan kondisi geografis yang menantang. Dengan demikian, pembangunan Satuan pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu indikator kesiapan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong serta mewujudkan pemerataan pelayanan gizi bagi masyarakat (BGN, 2025).

4.2.2 Strategi dan Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Tingkat Lokal

A. Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

1. Mekanisme Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sorong dilakukan melalui mekanisme distribusi makanan dari dapur satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuju sekolah-sekolah penerima manfaat. Berdasarkan hasil penelitian, makanan dipersiapkan terlebih dahulu di dapur SPPG sebelum kemudian diantar ke sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Setelah makanan tiba di sekolah, pihak sekolah melakukan penyimpanan sementara sebelum makanan dibagikan kepada siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk I Ketut Widura, S.Pd., M. Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong sebagai Berikut:

Setelah makanan tiba, kami menampungnya dulu di tempat penyimpanan sementara. Kemudian saat siswa sudah siap, kami membagikannya secara bertahap per kelas. Proses pembagian makanan dilakukan secara bertahap agar seluruh siswa dapat menerima makanan dengan tertib dan merata. (wawancara pada 22 April 2026).

Selain itu, pelaksanaan program juga melibatkan koordinasi antara sekolah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan SPPG sebagai pelaksana teknis penyediaan makanan bergizi. Pihak sekolah berperan dalam membantu pembagian makanan dan pengawasan siswa selama program berlangsung. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (2024), mekanisme pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dilakukan melalui sistem pelayanan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bertugas menyiapkan, mengolah, dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah.

2. Ketepatan sasaran penerima manfaat

Ketepatan sasaran penerima manfaat menjadi bagian penting dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong. Berdasarkan hasil penelitian,

penentuan sasaran dilakukan melalui pendataan siswa oleh Dinas Pendidikan dan pemetaan sekolah penerima manfaat program.

Hal ini disampaikan oleh Bpk Andreas Taa, S.Ag. selaku Kepala Dinas Pendidikan sebagai berikut:

Dinas Pendidikan itu lebih banyak menyiapkan data-data siswa yang dibutuhkan oleh tim Satgas atau SPPG.” Data tersebut digunakan untuk menentukan jumlah siswa penerima manfaat, kebutuhan distribusi makanan pada masing-masing sekolah dan juga kebutuhan untuk pembangunan dapur SPPG. (wawancara pada 17 April 2026).

Selain itu, pemetaan sekolah juga dilakukan berdasarkan kondisi wilayah dan jumlah peserta didik agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif. Sekolah yang berada di wilayah pedalaman menjadi perhatian khusus karena menghadapi keterbatasan akses distribusi makanan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (2024), penyediaan data pendidikan yang akurat menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program pelayanan dasar, termasuk program intervensi gizi berbasis sekolah agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

3. Kualitas Standar gizi Makanan

Kualitas dan standar gizi makanan menjadi salah satu aspek utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong. Berdasarkan hasil penelitian, penyusunan menu makanan dilakukan oleh tenaga ahli gizi yang berada di bawah pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Badan Gizi Nasional.

Hal ini disampaikan oleh Bpk dr. Ronney Ch.N. Kalesaran selaku Kepala Dinas Kesehatan, sebagai berikut:

Setiap SPPG memiliki ahli gizi tersendiri yang diangkat oleh Badan Gizi Nasional.” Ahli gizi ini memiliki tugas untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar gizi dan aman untuk dikonsumsi. Sehingga yang kami lihat selama

ini terkait standar gizi pasi suda sesuai dan aman untuk dikonsumsi. Dan juga jika terjadi masalah kesehatan setelah mengkonsumsi menu tersebut, kami akan memeriksa sampel tersebut di laboratorium dan sampel makanan disimpan selama 2x24 jam untuk kebutuhan pemeriksaan apabila terjadi keluhan kesehatan dari penerima manfaat. (wawancara pada 17 April 2026).

Selain itu, pengawasan kualitas makanan juga dilakukan melalui quality control dan pemeriksaan sampel makanan apabila ditemukan masalah kesehatan setelah makanan dikonsumsi siswa. Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa “Jika terjadi masalah kesehatan setelah mengonsumsi menu tersebut, Dinas Kesehatan akan memeriksa sampel tersebut di laboratorium.” Sampel makanan disimpan selama 2x24 jam untuk kebutuhan pemeriksaan apabila terjadi keluhan kesehatan dari penerima manfaat. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023), pengawasan keamanan pangan dan standar gizi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program intervensi gizi berbasis sekolah untuk mencegah risiko gangguan kesehatan pada peserta didik.

4. Strategi koordinatif, fasilitatif, dan adaptasi lokal

Dalam menghadapi berbagai keterbatasan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong melakukan sejumlah strategi adaptasi kebijakan untuk memastikan program tetap berjalan. Salah satu strategi utama adalah pendekatan koordinatif dan fasilitatif, di mana pemerintah daerah berperan sebagai penghubung antar pemerintah pusat, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pemetaan sasaran penerima manfaat melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketepatan sasaran program.

Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan dalam implementasi program, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tetap melakukan sejumlah upaya dan strategi adaptif untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan. Strategi tersebut

mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan kondisi lokal, walaupun pelaksanaannya masih cenderung bersifat responsif terhadap masalah yang muncul dan belum disusun secara terstruktur serta berkelanjutan. Strategi utama yang diterapkan pemerintah daerah adalah penguatan pendekatan koordinatif dan fasilitatif melalui pembentukan Satuan Tugas Makan bergizi Gratis. Satgas ini berperan sebagai wadah koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mempermudah komunikasi, pertukaran informasi, serta penyelesaian berbagai hambatan implementasi secara terpadu.

Hal ini disampaikan oleh Bpk Andreas Taa, S.Ag. Selaku Kepala Dinas Pendidikan:

Jadi untuk mendukung program ini di kabupaten sorong kami telah membentuk Satgas. Satgas ini merupakan gabungan OPD terkait, tugas utama mereka adalah melakukan fasilitasi dan mencari jalan keluar jika terdapat hambatan di daerah terkait program ini. (wawancara pada 17 April 2026).

Pendekatan kolaboratif tersebut sejalan dengan konsep *Open Governance* yang dikemukakan oleh Boadu (2024), yaitu model pemerintahan yang menekankan keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Walaupun Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis di kabupaten Sorong belum sepenuhnya melibatkan unsur masyarakat sipil secara luas, keberadaan Satuan Tugas tetap menunjukkan adanya upaya Pemerintah Daerah untuk menjalankan program secara terintegrasi dan tidak terbatas pada pendekatan sektoral semata. Selain itu, bentuk strategi adaptasi yang paling menonjol ditemukan pada upaya Pemerintah Daerah dalam menghadapi tantangan geografis, yaitu melalui inisiatif pembangunan dapur SPPG di wilayah pedalaman yang ditempatkan di lingkungan sekolah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bpk Andreas Taa, S.Ag. Selaku Kepala Dinas Pendidikan, yakni;

Di daerah-daerah pedalaman itu pembangunan dapur dilakukan di area sekolah untuk memudahkan penyajian makanan yang masih segar dan bisa langsung dinikmati pada saat makanannya hangat. Tetapi sebagian dapur di pedalaman masih dalam proses pembangunan dapurnya. (wawancara pada 17 April 2026).

Inisiatif tersebut menunjukkan adanya pola pikir adaptif dari pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan distribusi pada wilayah yang memiliki jarak tempuh cukup jauh. Pembangunan dapur di area sekolah dilakukan sebagai upaya mendekatkan lokasi produksi makanan dengan tempat penerima manfaat, sehingga kendala keterlambatan distribusi akibat ketebatan transportasi dan jauhnya akses wilayah dapat dikurangi secara lebih efektif. Pendekatan ini dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai model implemntasi yang lebih berkelanjutan, khususnya bagi wilayah terpencil di Kabupaten Sorong maupun daerah lain di Papua yang memiliki karakteristik geografis serupa.

Dalam aspek oprasional, pemerintah daerah mendorong kolaborasi dengan pihak sekolah. Terutama dalam penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat distribusi makanan. Meskipun sederhana, strategi ini menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap keterbatasan infrastruktur. Namun demikian, strategis yang dilakukan masih belum sepenuhnya mampu mengatsi kendala utama, seperti keterlambatan distribusi dan kualitas makanan yang tidak konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa strategi implementasi masih bersifat reaktif, belum berbasis pada sistem manajemen terintegrasi.

Dalam mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis di tingkat lokal, Pemerintah daerah Kabupaten Sorong menerapkan berbagai strategi dan upaya untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi daerah. Salah satu strategi utama adalah penguatan koordinasi lintas sektor melalui Satgas MBG. Satgas ini berfungsi sebagai wadah kolaborasi anatara berbagai instansi untuk mengatasi hambatan di lapangan.

Sebagaimana disampaikan oleh Bpk Andreas Taa, S.Ag. Selaku Kepala Dinas Pendidikan;

Kami selalu berusaha menyesuaikan kondisi di daerah agar program ini tetap berjalan. Dan kami selalu melakukan koordinasi ataupun turun lapangan untuk melihat pendistribusian makanan. dan kamipun sempat melakukan evaluasi karena ada beberapa siswa yang mengalami alergi di salah satu sekolah. (wawancara pada 17 April 2026).

Selain itu, Pemerintah daerah juga berupaya mendorong keterlibatan sumber daya lokal dalam rantai pasok Makan Bergizi Gratis. Kepala Dinas Pendidikan mengungkapkan aspirasi untuk memberdayakan petani dan nelayan setempat.

Sebagaimana disampaikan oleh Bpk Andreas Taa, S.Ag. Selaku Kepala Dinas Pendidikan, yakni:

Kami terus berkoordinasi dengan pusat, terkait kendala di lapangan. Dan juga sebenarnya sesuai dengan kampanye mereka adalah memberdayakan masyarakat lokal atau setempat, yang dimana para petani, nelayan menjadi kontributor terhadap bahan makanan untuk program ini. Untuk sekarang keterlibatan mereka belum semua terlibat menjadi pemasok BAMA. Tentunya jadi harapan besar kami, kebutuhan dapur itu seluruhnya mereka belanja dari masyarakat. Sehingga dari situlah mereka memberdayakan masyarakat setempat. (wawancara pada 17 April 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dua sisi yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Di satu sisi, terdapat orientasi kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui keterlibatan petani dan nelayan dalam penyediaan bahan pangan program. Namun disisi lain, kondisi dilapangan memperlihatkan bahwa keterlibatan kelompok produsen lokal tersebut masih belum berjalan secara optimal. Perbedaan antar harapan kebijakan dan realitas implementasi ini menggambarkan kompleksitas dalam membangun sistem rantai pasok pangan lokal yang berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya membutuhkan komitmen politik dari pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur distribusi, sistem logistik yang memadai, serta peningkatan kapasitas produksi masyarakat lokal agar mampu memenuhi kebutuhan program secara konsisten.

Strategi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengedepankan pendekatan kolaboratif dalam implementasi kebijakan. Pemerintah Daerah juga melakukan strategi berbasis data melalui pemetaan sasaran penerima manfaat. Dinas Pendidikan berperan dalam menyediakan data siswa untuk menentukan distribusi program. Melalui Satgas, Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan secara lebih cepat dan melakukan penanganan secara terpadu.

Hubungan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong melakukan koordinasi intensif. Sehingga koordinasi ini menjadi strategi penting dalam menjembatani kebijakan pusat dengan kondisi lokal. Hal ini menunjukkan adanya upaya supaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan efektifitas program. Pemerintah Daerah juga mendorong pelibatan sumber daya lokal. Pemerintah daerah juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal sebagai bagian dari strategi implementasi program. Hal ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam penyediaan bahan pangan.

B. Dampak sosial-ekonomi dan potensi pemberdayaan masyarakat lokal

Meskipun implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong masih menghadapi berbagai hambatan, penelitian ini menemukan bukti empiris yang cukup kuat bahwa program ini telah memberikan dampak positif yang dirasakan secara langsung oleh penerima manfaat. Dampak tersebut mencakup gizi, pendidikan, dan ekonomi keluarga. Dari perspektif kepala sekolah sebagai observer yang paling dekat dengan penerima manfaat, program Makan Bergizi Gratis telah berkontribusi pada peningkatan motivasi dan kehadiran siswa.

Hal ini disampaikan oleh Bpk I Ketut Widura, S.Pd., M. Pd., Selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong sebagai Berikut:

Program ini sangat membantu siswa-siswi kami, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang pada awalnya mereka tidak makan dari rumah setelah adanya program ini mereka sekarang bisa makan di sekolah. Dan juga Ada perubahan semangat belajar dan kehadiran siswa semenjak program ini berjalan. (wawancara pada 17 April 2026)

Hal ini mengkonfirmasi kerangka dari FAO (2008) tentang pemanfaatan pangan, yang menegaskan bahwa ketercukupan gizi secara langsung mempengaruhi kapasitas kognitif dan produktifitas individu. Dalam lingkungan pendidikan, siswa yang menerima nutrisi yang cukup menunjukkan peningkatan kemampuan konsentrasi dan tingkat ketidakhadiran yang lebih rendah, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan prestasi akademik.

Dari perspektif ekonomi rumah tangga, implementasi program ini menunjukkan kontribusi positif dalam menurunkan beban pengeluaran keluarga, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan konsumsi anak selama berada di lingkungan sekolah.

Disampaikan oleh Anggun Lukondo Siswa SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong;

Sebelum program ini ada kami selalu membawa jajan ke sekolah untuk beli makan tetapi semenjak ada program ini kami sering tidak membawa uang jajan untuk berbelanja lagi pada istirahat di sekolah, sehingga pengeluaran kami atau pengeluaran orang tuapun berkurang semenjak ada makan bergizi gratis ini. Kami jadi tidak boros karena tidak perlu jajan atau beli makanan lagi di luar. Sehingga uang jajan bisa disimpan atau dipakai ongkos taksi. Tanggapan orang tua kami juga sangat senang karena mengurangi uang jajan kami. (wawancara pada 22 April 2026).

Temuan tersebut sejalan dengan konsep aksesibilitas dalam kerangka ketahanan pangan FAO (2008), yang menekankan pentingnya keterjangkauan pangan bergizi bagi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Dalam konteks ini, Program Makan Bergizi Gratis berperan signifikan dalam memperluas akses terhadap pangan bergizi bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci di Kabupaten Sorong, komitmen politik pemerintah daerah terlihat sangat kuat yang dibuktikan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati serta melibatkan unsur TNI/Polri dan Organisasi Perangkat Daerah teknis. Pada fase awal, koordinasi sempat terkendala oleh ego sektoral antar-instansi karena ketidakjelasan pembagian peran kerja. Namun, situasi tersebut berhasil diatasi setelah Dinas Pendidikan ditempatkan sebagai motor utama dalam proses validasi data peserta didik, sementara Dinas Kesehatan difokuskan pada pengawasan mutu, sehingga menciptakan pola komunikasi birokrasi yang lebih terintegrasi.

Sehingga, temuan lapangan mengungkap adanya keterbatasan otonomi yang cukup signifikan bagi pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong dibatasi hanya pada ranah administratif dan fasilitatif untuk menyiapkan data siswa yang nantinya diserahkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Seluruh otoritas pengelolaan dapur, anggaran operasional, hingga perekrutan tenaga ahli gizi ditarik sepenuhnya ke pemerintah pusat di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga menempatkan aktor daerah sebagai pelaksana teknis yang memiliki ketergantungan struktural tinggi terhadap pusat.

Pada tingkat implementasi satuan pendidikan, seperti di SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong, hambatan terbesar yang muncul berakar dari keterbatasan infrastruktur logistik dan tantangan geografis yang ekstrem. Distribusi makanan sering kali mengalami keterlambatan hingga melewati jam istirahat siswa akibat minimnya armada transportasi pengantar yang hanya mengandalkan satu unit mobil untuk menjangkau banyak titik sekolah. Guna mensiasati kendala operasional tersebut dan memastikan makanan tetap higienis, pemerintah daerah menerapkan strategi adaptasi lokal berupa rencana

pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di dalam area sekolah pedalaman seperti di wilayah Klamono, serta mewajibkan penyimpanan sampel makanan selama 2 x 24 jam oleh Dinas Kesehatan sebagai langkah mitigasi risiko keracunan panga.

Jika dikontekstualisasikan dengan Teori Kesiapan Pemerintah (Governance Readiness), kondisi di Kabupaten Sorong menunjukkan adanya ketimpangan antara kesiapan regulatif-politik dan kesiapan manajerial-operasional. Secara regulatif, pemerintah daerah dinilai sangat siap karena mampu merespons instruksi pusat dengan cepat melalui legalitas pembentukan Satgas dan penyelarasan dokumen perencanaan daerah. Namun, mengacu pada kerangka konseptual kesiapan institusional, daerah ini belum sepenuhnya siap mandiri karena tidak memiliki kendali penuh atas aspek finansial dan pengelolaan teknis gizi yang seluruhnya dimonopoli oleh institusi vertikal pusat.

Selanjutnya, apabila dibedah menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III, keberhasilan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh interaksi antara disposisi, komunikasi, dan sumber daya (resources). Faktor disposisi kepemimpinan di Kabupaten Sorong sangat mendukung keberhasilan program berkat keterlibatan aktif Wakil Bupati, dan faktor komunikasi antar-Organisasi Perangkat Daerah pun telah berjalan cukup lancar. Akan tetapi, implementasi kebijakan ini membentur masalah pembagian sumber daya (resources) yang tidak merata, di mana keterbatasan armada logistik di lapangan menggagalkan ketepatan waktu distribusi makanan kepada para siswa. Masalah operasional ini sejalan dengan Spektrum Kebijakan Gizi dari Pelletier yang menegaskan bahwa kegagalan program gizi di negara berkembang sering kali bukan disebabkan oleh rancangan menunya, melainkan akibat lemahnya kapasitas manajerial dalam menerjemahkan komitmen politik menjadi aksi logistik yang konkret.

Perspektif Teori Kebijakan Pangan dan Kesejahteraan (Food Security Governance) yang mengacu pada empat pilar FAO, program MBG di Sorong baru mampu menyentuh pilar ketersediaan (availability) pangan melalui pembangunan dapur komunal. Namun, program ini masih rapuh pada pilar aksesibilitas (accessibility) dan stabilitas (stability) akibat buruknya konektivitas jalan dan minimnya moda transportasi di wilayah Papua Barat Daya. Inisiatif pemerintah daerah dalam mendekatkan lokasi dapur ke sekolah-sekolah di wilayah pedalaman merupakan bentuk upaya nyata untuk menyelamatkan pilar aksesibilitas fisik agar pemenuhan gizi anak sekolah dapat berjalan secara berkelanjutan.

Temuan penelitian mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sorong ini memiliki keterkaitan erat serta memperkuat beberapa kajian terdahulu. Hasil analisis di lapangan linear dengan studi Roeslie dan Bachtiar (2018) serta Sahroji dan Hidayat (2002), yang menegaskan bahwa kesiapan fasilitas, kompetensi tenaga pelaksana, dan mitigasi ego sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah pada fase transisi merupakan pilar utama penentu keberhasilan kebijakan kesehatan masyarakat. Selain itu, dinamika yang ditemukan di Kabupaten Sorong juga mendukung riset Febryanti, Indiati, dan Pane (2025) mengenai pentingnya sinergitas yang proporsional antara kesiapan pemerintah daerah, kesiapan pihak sekolah, dan tingkat partisipasi aktif masyarakat sipil demi keberlanjutan program pemenuhan gizi ini.

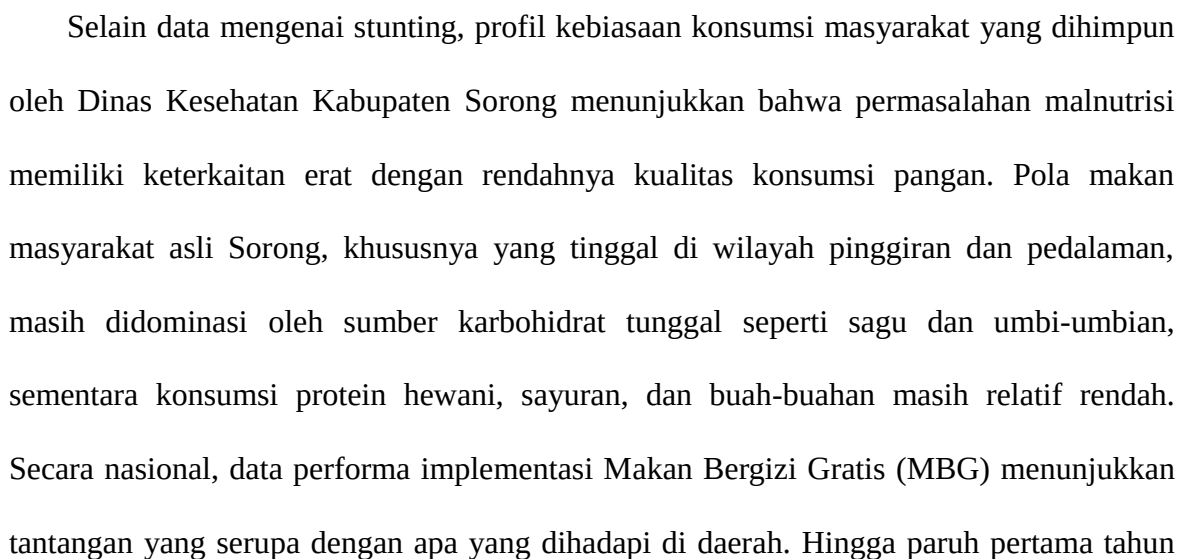
Di sisi lain, potret hambatan yang ditemukan di wilayah ini menjadi konfirmasi empiris yang memperkuat penelitian Leki dan Hardianto (2024) di Kabupaten Belu serta Wuisan (2025) di Kabupaten Mappi, Papua Selatan. Ketiga riset ini secara senada menyimpulkan bahwa keterbatasan infrastruktur dasar, tingginya ketergantungan finansial terhadap dana transfer pusat, dan kondisi geografis yang ekstrem merupakan tembok besar dalam pelaksanaan program nasional di wilayah terpencil. Fenomena keterlambatan distribusi pangan serta kendala operasional pembangunan fasilitas di pedalaman Papua

Barat Daya membuktikan bahwa karakteristik daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) menuntut pendekatan logistik dan kebijakan yang bersifat khusus, yang tidak dapat disamakan dengan standarisasi wilayah urban.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan signifikan yang memunculkan unsur kebaruan jika dibandingkan dengan riset-riset di wilayah barat Indonesia, seperti studi Febryanti, (2025) di Malang atau Rosidin & Maulana (2025) di Banten. Di wilayah-wilayah tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang diskresi yang luas untuk mengintegrasikan pelaku usaha setempat dan mengelola rantai pasok lokal secara mandiri. Sebaliknya, di Kabupaten Sorong, terjadi apa yang disebut sebagai "asimetri kelembagaan baru," di mana desain kebijakan Makan Bergizi Gratis kontemporer secara sistematis memangkas otonomi daerah dan memosisikan pemerintah daerah sekadar sebagai penonton administratif atau "validator data" semata.

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini menegaskan bahwa model pendekatan top-down yang terlalu kaku dari Badan Gizi Nasional berisiko mematikan inisiatif lokal di tanah Papua. Sementara penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada dampak gizi secara klinis atau kesiapan anggaran makro, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis baru mengenai bagaimana relasi kuasa pusat-daerah dalam struktur birokrasi vertikal dapat memengaruhi efektivitas distribusi logistik pangan di wilayah dengan karakteristik geografis kepulauan dan pedalaman.

Untuk memperkuat validitas argumentasi dari hasil wawancara, analisis ini didukung oleh data sekunder berskala nasional dan lokal terkait kondisi riil kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka stunting nasional masih bertengger di angka 21,5%, yang berarti pemerintah gagal memenuhi target makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional



pelaksanaan, program Makan Bergizi Gratis secara nasional baru mampu menjangkau sekitar 5,6 juta jiwa penerima manfaat dari target total keseluruhan, dengan sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum merata dan baru mencapai 1.873 satuan di seluruh Indonesia. Lambatnya realisasi performa makro ini terbukti berimplikasi langsung pada lambatnya penyelesaian pembangunan infrastruktur dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di distrik-distrik pedalaman Kabupaten Sorong, seperti yang terjadi di wilayah Klamono.

Jalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sorong memunculkan sebuah paradoks desentralisasi yang nyata, atau yang dapat diistilahkan sebagai "Desentralisasi Semu." Ketika pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memonopoli penuh pengelolaan anggaran serta memegang otoritas mutlak dalam penunjukan tenaga ahli di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ruang bagi Pemerintah Daerah untuk berinovasi berbasis kearifan lokal menjadi mati. Kondisi ini menempatkan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam posisi yang rentan secara politik dan sosial; mereka memikul beban moral dan tanggung jawab langsung di mata warganya karena Satgas dipimpin oleh Wakil Bupati, namun mereka tidak dibekali dengan instrumen kekuasaan keuangan dan teknis yang memadai untuk menyelesaikan masalah di lapangan.

Sehingga adanya jurang pemisah yang lebar antara desain kebijakan di atas kertas dengan realitas sosiogeografis di lapangan (implementation gap). Arsitektur program Makan Bergizi Gratis (MBG) didesain dengan asumsi kelancaran mobilitas logistik yang umumnya hanya dijumpai di Pulau Jawa atau kawasan perkotaan yang memiliki akses jalan aspal yang mapan. Ketika konsep yang sama dipaksakan berjalan di Kabupaten Sorong yang memiliki topografi ekstrem, kebijakan ini mengalami ketegangan operasional yang akut. Memaksakan pengantaran makanan matang siap saji ke sekolah-sekolah yang saling berjauhan hanya dengan mengandalkan satu unit mobil tidak hanya tidak rasional

dari sudut pandang manajemen logistik, tetapi juga membahayakan kesehatan anak-anak karena fluktuasi suhu selama keterlambatan pengiriman dapat memicu pertumbuhan bakteri pada makanan.

Selain itu, kelemahan mendasar dari program ini di Kabupaten Sorong adalah absennya keterlibatan masyarakat sipil, lembaga adat, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam rantai pasok secara terstruktur. Program ini berjalan secara mekanistik dari atas ke bawah (top-down), di mana bahan baku makanan sering kali didatangkan dari luar daerah demi mengejar standardisasi harga pusat. Jika rantai pasok makanan tidak segera diintegrasikan dengan potensi petani, peternak, dan nelayan lokal Sorong, maka program mulia ini hanya akan berakhir sebagai proyek pemborosan anggaran negara jangka pendek yang gagal menciptakan kemandirian pangan serta gagal memberikan dampak multiplier secara ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran empiris mengenai kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan kondisi yang terjadi di Kabupaten Sorong dan belum dapat digeneralisasikan secara luas untuk seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan peneliti belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sorong, khususnya daerah pedalaman yang memiliki akses transportasi cukup sulit, sehingga data yang diperoleh masih didominasi dari wilayah yang lebih mudah dijangkau. Penelitian ini juga lebih banyak menggunakan informasi dari pihak pemerintah daerah dan sekolah, sehingga perspektif masyarakat sebagai penerima manfaat program belum tergali secara menyeluruh. Padahal, pandangan masyarakat sangat penting untuk

menilai efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara langsung di lapangan.

Di samping itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih tergolong sebagai program baru sehingga dampak jangka panjangnya terhadap penurunan angka stunting, peningkatan status gizi, serta kualitas pendidikan masyarakat belum dapat diamati secara mendalam. Penelitian ini lebih berfokus pada aspek kesiapan pemerintah daerah dan proses implementasi program. Peneliti juga mengalami keterbatasan dalam memperoleh beberapa dokumen teknis serta data pendukung terkait pelaksanaan program, terutama yang berkaitan dengan proses distribusi dan mekanisme implementasi di lapangan. Namun demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting dalam memberikan pemahaman mengenai kesiapan kelembagaan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kesiapan Pemerintah Daerah dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sorong, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesiapan Pemerintah Daerah: Pemerintah Kabupaten Sorong telah menunjukkan adanya kesiapan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada aspek administratif dan koordinatif. Hal ini ditandai dengan pembentukan Satgas Makan Bergizi Gratis, keterlibatan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta integrasi program ke dalam dokumen perencanaan daerah. Namun, kesiapan tersebut masih berada pada tahap administratif dan belum sepenuhnya mencapai kesiapan operasional yang mandiri karena pelaksanaan program masih sangat bergantung pada kebijakan teknis, pendanaan, dan arahan dari pemerintah pusat.
2. Kesiapan Pendanaan dan Kelembagaan: Kesiapan Pemerintah Kabupaten Sorong juga masih menghadapi keterbatasan pada aspek pendanaan dan kelembagaan. Tingginya ketergantungan terhadap pendanaan pemerintah pusat menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum mampu mendukung keberlanjutan program secara mandiri. Belum adanya alokasi khusus dari APBD serta ketiadaan mekanisme pendanaan cadangan di tingkat daerah menjadikan keberlangsungan program rentan terhadap perubahan kebijakan dan kondisi fiskal nasional.
3. Strategi Adaptasi Melalui Pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi: Salah satu strategi yang dilakukan dalam menyesuaikan implementasi Makan Bergizi Gratis dengan kondisi lokal adalah pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

(SPPG) yang lebih dekat dengan lokasi penerima manfaat, khususnya di wilayah pedalaman. Strategi ini merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi geografis Kabupaten Sorong yang memiliki tantangan aksesibilitas cukup tinggi. Dengan mendekatkan lokasi produksi makanan ke sekolah, hambatan distribusi dapat diminimalkan dan kualitas makanan dapat lebih terjaga.

4. Strategi Penguatan Ekosistem Pangan Lokal: Strategi lain yang berpotensi memperkuat implementasi program adalah integrasi petani, nelayan, UMKM, dan produsen pangan lokal ke dalam rantai pasok Makan Bergizi Gratis. Pendekatan ini tidak hanya mendukung ketersediaan bahan pangan yang lebih berkelanjutan, tetapi juga dapat menciptakan efek pengganda ekonomi (*multiplier effect*) bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, Makan Bergizi Gratis dapat berfungsi tidak hanya sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi daerah.
5. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendukung Implementasi Program: Pemerintah Kabupaten Sorong telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis melalui koordinasi lintas sektor, penyediaan dukungan kelembagaan, serta penyesuaian pelaksanaan program dengan kondisi lokal. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional Asta Cita meskipun kewenangan utama program masih berada pada pemerintah pusat.
6. Upaya Mewujudkan Manfaat Program bagi Masyarakat: Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis yang telah berjalan menunjukkan dampak positif bagi penerima manfaat. Program ini berkontribusi terhadap peningkatan motivasi belajar siswa, peningkatan kehadiran peserta didik di sekolah, serta membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga untuk kebutuhan konsumsi anak. Temuan ini menunjukkan bahwa Makan Bergizi Gratis

memiliki manfaat sosial yang nyata sehingga perlu terus diperkuat melalui pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

7. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Program: Meskipun berbagai persiapan, strategi, dan upaya telah dilakukan, implementasi Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong masih menghadapi sejumlah hambatan. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan infrastruktur pendukung, tingginya ketergantungan pendanaan pada pemerintah pusat, keterbatasan armada distribusi, belum meratanya ketersediaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, serta kondisi geografis yang menyulitkan akses ke beberapa wilayah layanan. Selain itu, masih terdapat kendala teknis terkait distribusi, sanitasi, dan tata kelola logistik yang menunjukkan bahwa program masih berada pada tahap implementasi awal.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Sorong belum sepenuhnya siap dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis karena pelaksanaannya masih berada pada tahap awal masih terlalu dini dan kesiapan yang dimiliki saat ini lebih dominan pada aspek administratif dibandingkan aspek operasional. Meskipun telah terdapat berbagai strategi adaptasi dan upaya pendukung, masih ditemukan sejumlah kendala struktural, fiskal, geografis, dan infrastruktur yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kemandirian pendanaan daerah, penambahan dan pemerataan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, penguatan sistem distribusi, serta kolaborasi yang lebih komprehensif antar pemangku kepentingan agar implementasi Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Sorong.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sorong: Pemerintah Kabupaten Sorong perlu meningkatkan kesiapan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sekadar kesiapan administratif menuju kesiapan operasional yang lebih komprehensif. Penguatan koordinasi lintas sektor perlu diiringi dengan perencanaan teknis yang lebih matang, terutama dalam aspek distribusi, pengelolaan logistik, serta pemetaan kebutuhan infrastruktur di setiap wilayah layanan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Penguatan Regulasi Daerah: Selain pembentukan Satgas Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Kabupaten Sorong perlu memperkuat landasan hukum program melalui penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) yang secara khusus mengatur dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Keberadaan Perbup penting untuk memberikan kepastian kelembagaan, memperjelas pembagian tugas dan kewenangan antarinstansi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menjadi dasar hukum bagi pengalokasian sumber daya daerah dalam mendukung keberlanjutan program.
3. Optimalisasi Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional perlu melakukan evaluasi terhadap jumlah, lokasi, dan beban kerja setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Penentuan cakupan layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi harus mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, kondisi geografis, jarak distribusi, serta kapasitas produksi masing-masing dapur. Dengan demikian, distribusi makanan dapat berlangsung lebih tepat waktu, efisien, dan

mampu menjaga kualitas serta keamanan pangan yang diterima oleh peserta didik. Penambahan dan pemerataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah yang memiliki cakupan layanan luas juga perlu diprioritaskan untuk mengurangi hambatan distribusi.

4. Penguatan Peran Dinas Kesehatan: Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong perlu berperan lebih aktif dalam mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis dengan menugaskan tenaga kesehatan atau petugas gizi untuk melakukan pendampingan dan pemantauan secara berkala pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pengawasan tersebut meliputi standar gizi menu, keamanan pangan, sanitasi dapur, serta pemantauan status gizi penerima manfaat. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya tersedia dan terdistribusi dengan baik, tetapi juga memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan guna mendukung tujuan peningkatan kualitas kesehatan dan penurunan masalah gizi pada anak.
5. Penguatan Ekosistem Pangan Lokal: Pemerintah daerah perlu mendorong keterlibatan petani, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha pangan lokal dalam rantai pasok Makan Bergizi Gratis. Selain memperkuat ketahanan pangan daerah, langkah ini dapat menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Sorong dan meningkatkan keberlanjutan program dalam jangka panjang.
6. Bagi Penelitian Selanjutnya: Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas Program Makan Bergizi Gratis secara lebih mendalam melalui pengukuran dampak terhadap status gizi, prestasi belajar, ketahanan pangan rumah tangga, serta dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu, penelitian komparatif antar daerah di Kawasan Timur Indonesia juga penting dilakukan untuk memperoleh model

implementasi Makan Bergizi Gratis yang paling sesuai dengan karakteristik wilayah terpencil dan kepulauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwala, C., Jemaneh, J., & Y. (2022). *Government Policies and Sustainable Food Systems: Navigating Challenges, Seizing Opportunities, And Advancing Environmental And Social Resilience. Law and Economics Journal.*
- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362.
- Albaburrahim, A., Putikadyanto, A. P. A., Efendi, A. N., Alatas, M. A., Romadhon, S., & Wachidah, L. R. (2025). Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. *ENTITA Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 767
- Alta, A., Auliya, R., & Fauzi, A. N. (2023). *Policy Barriers to a Healthier Diet: The Case of Trade and Agriculture`. Center for Indonesian Policy Studies.*
among five approaches (4th ed). Sage Publications.
- Amril, A., & Sazali, H. (2025). Formulasi Regulasi dan Kebijakan Komunikasi dalam Pelaksanaan Program Pembangunan: Studi pada Program Makan Bergizi Gratis. *Jurnal Indonesia Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(3), 1670.
- Banunaek, F. R., et al. (2024). *Implementation of the Stunting Reduction Acceleration Program at Kapan Health Center, North Mollo District, South Central Timor Regency. International Journal of Environmental, Social and Sustainability Studies*, 2024.
- Boadu, E. S. (2024). *Evaluating Ghana's Youth-Centered Food-Security Policies: A Collaborative Governance Approach. Sustainability.*
- Bollyky, T. J., Templin, T., Cohen, M., Schoder, D., Dieleman, J. L., & Wigley, S. (2022). *The relationships between democratic experience, adult health, and cause-specific mortality. The Lancet*, 399(10338), 1961-1971.
- Candel, J. J. L. (2014). *Food securiry governance: A systematic literature review. Food Security.*
- Clark, J. K., Freedgood, J., Irish, A., & Hodgson, K. (1978). *Fail to include, plan to exclude: Reflections on local governments' readiness for build ing equitable community food systems. JSTOR.*
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing*
- Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong. (2025, 16 April). *Menyikapi Isu Kesehatan terbaru.* <https://bppauddikmas-bali.id/2025/04/dinas-kesehatan-kabupaten-sorong-menyikapi-isu-kesehatan-terbaru/>
- Dinas Kesehtan Provinsi Aceh. (2025, January 25). *Pilih makan bergizi untuk keluarga sehat: Tema Hari Gizi Nasional 2025.* <https://dinkes.acehprov.go.id/detailpost/pilih-makanan-bergizi-untuk-keluarga-sehat-tema-hari-gizi-nasional-2025>

- Edwards III, G.C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Fauzia, M. E., Halimah, Z. N., & Hapsari, Y. I. (2026). Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. JISIP UNJA.
- Febryanti, I., Indiati, I., & Pane, M. A. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis. *Dialogue: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Fitriyani, A. D., & Salomo, R. V. (2024). *The Readiness of Local Governments in Indonesia in Implementing Talent Management Policies: An Organisational Readiness for Implementing Change (ORIC) Approach*. *Journal of Public Policy and Social Research*, 5(3).
- Food and Agriculture Organization. (2008). *An Introduction to the Basic Concepts of Food Security*. FAO.
- Hali, A., Sadiyah, H., Dewi, Z. D., & Syahputra, M. Z. (2025). *Optimal Strategies to Increase National Income in Realising Golden Indonesia 2045*. *Indonesian Research Journal of Education*.
- Herdiana, D. (2025). Implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor pendorong dan penghambat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 470–478.
- Hunga, H. G., Chiwaula, L., & Katundu, M. (2023). *Organizational readiness for policy implementation: An assessment of the harmonized seed regulations in Malawi*. *Science Direct*.
- Jasman, H. (2025, januari 25). Asta Cita dan Refleksi UU Ombudsman RI. Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--asta-cita-dan-refleksi-uu-ombudsmanri>
- Kementerian Republik Indonesia. (2025). Makan bergizi gratis di Sulawesi Tenggara: Membaca data penerima dan tantangan perlindungan gizi anak. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kendari/id/data-publikasi/artikel/2916-makan-bergizi-gratis-di-sulawesi-tenggara-membaca-data-penerima-dan-tantangan-perlindungan-gizi-anak.html>
- Khatmawati, H., & Putri, Y. E. (2026). *Model rantai pasok berkelanjutan pada program makan bergizi gratis berbasis pangan lokal di Kabupaten Sumbawa*. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 3(1), 418–433.
- Leki, D. F., Hardianto, W. T., & Suprojo, A. (2024). *Implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait upaya penanganan stunting (Studi kasus di Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu)*. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 92–100.
- Liputan6.com (2025, January 4). Wujudkan langkah nyata menuju generasi emas Indonesia 2045, program makan bergizi gratis siap dimulai. <https://www.liputan6.com/news/read/5864550/wujudkan-langkah-nyata-menuju->

[generasi-emas-indonesia-2045-program-makan-bergizi-gratis-siap-dimulai#google_vignette](#)

- Mazda, C. N., & Nurhayati, E. (2025). *Study Behaviour of Prabowo Subianto's Leadership as the President of Indonesia*. *SADR Journal*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mwangi, A. K. (2024). *Exploring the role of regulatory frameworks in bridging policy implementation strategies and addressing food insecurity in Kenya: A case of Murang' County*. *International journal of Research Publication and Reviews*, 5(4), 4132-4136.
- Ng, S. H., Yeatman, H., Kelly, B., Sankaranarayanan, S., & Karupaiah, T. (2022). *Identifying barriers and facilitators in the development and implementation of government-led food environment policies: a systematic review*. *Nutrition reviews*, 80(8), 1896-1918.
- Oehmke, J. F., Young, S. L., Heinemann, A. W., & Rukuni, M. (2022). *A novel measure of developing countries' agricultural and food policy readiness*. *World Development*.
- Pambudi, A. W. (2024). *Indonesia Government's Efforts to Eradicate Stunting Through the Free Nutritious Meal Program for Children: Opportunities and Challenges*. *Politikom Indonesiana*.
- Parsons, K., & Barling, D. (2022). *England's food policy coordination and the Covid-19 response*. *Food security*, 14(5), 1027-1043.
- Pelletier, D. L., Frongillo, E. A., Gervais, S., Hoey, L., Menon, P., Ngo, T., Stoltzfus, R. j., & Ahmed, A. M. (2012). *Nutrition agenda setting, policy formulation and implementation: Lessons from the Mainstreaming Nutrition Initiative*. *Health policy and Planning*, 27(1), 19-31. <https://academic.oup.com/heapol/article/27/1/19/612816>
- Qomarrullah, R., Suratni, S., Wulandari, L., & Sawir, M. (2025). *Dampak jangka panjang program makan bergizi gratis terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan*. *Indonesia Journal Of Intellectual Publication (IJI Publication)*, 5(2), 130-137.
- Rasanathan, K., Bennett, S., Atkins, V., Beschel, R., Carrasquilla, G., Charles, J., ... El-Jardali, F (2023). *Governing multisectoral action for health in low and middle income countries*. *Health Policy and Planning*, 38(1), 1-11.
- Rasyid, H., Masruri, G. G., Nugraha, H., & Hidayat, A. (2025). *Free Nutritious Meal policy from the perspective of food security, education, and social justice*. *Leadership: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1).
- Roeslie, E., & Bachtiar, A. (2018). *Analisis persiapan implementasi program Indonesia sehat*. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*.
- Rosidin, A., & Maulana, J. (2025). *Tantangan Implementasi Program MBG*. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*.

- Sahroji, Q. N., & Hidayat, R. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan*.
- Sari, S. M. (2025). *Implementation of the free nutritious meal policy in Bondowoso Regency. Journal Publiccuho*, 8(3), 1898-1907
- Simbolon, R. S., & Shylendra, F. (2022). *Enhancing Food Security and Alleviating Poverty: Community Responses to the Poor Rice Program in Jaranguda Village, Indonesia. Law and Economics Journal*.
- Sundari, A. R., & Yusran, R. (2025). *Evaluating Food Security Policy Implementation: An Adaptive Governance Approach with Educational Implications. Indonesian Journal of Education and Social Studies*, 4(3), 290-301.
- Suprpto, F. A., Praditya, E., Dewi, R. M., & Adiyoso, W. (2025). *A Policy Implementation Review Of The Free Nutritious Meal (MBG) Program*.
- Tjilen, A. P., Tambaip, B., & Dharmawan, B. (2024). *Engaging stakeholders in policy decision-making for food security governance: Identification, perception, and contribution*.
- Tribun Sorong. (2025, July 13). Angka Stunting di Kabuapten Sorong turun 17 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional. *Tribunnews*.
<https://sorong.tribunnews.com/2025/07/13/angka-stunting-di-kabupaten-sorong-turun-jadi-17-persen-lebih-rendah-dari-rata-rata-nasional>
- World Food Programme (2020). *State of school Feeding Worldwide 2020*. Rome: WFP
- World Food Programme (WFP). (2013). *State of school Feeding Worldwide 2013*. Rome: WFP
- World Health Organization. (2021). *Action Framework for public food procurement policies for a healty diet*. World Health Organization.
- Wuisan, V. Z., Jaya, A., Sirante, Y., & Lambe, G. Z. (2025). Analisis kebijakan kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Mappi Papua Selatan terhadap program makan bergizi gratis. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 5603–5608.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong

No	Item Pertanyaan	Keterangan
1	Bagaimana kesiapan Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?	Untuk mengetahui kesiapan kelembagaan dan dukungan Dinas Pendidikan terhadap program.
2	Apakah jumlah dan kompetensi SDM pelaksana sudah memadai untuk mendukung program secara berkelanjutan?	Untuk mengetahui kesiapan SDM
3	Sejauh mana mekanisme tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial Kabupaten Sorong?	Mengetahui efektivitas distribusi lokal.
4	Apa peran Dinas Pendidikan dalam implementasi Program Makan bergizi Gratis di sekolah-sekolah?	Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program.
5	Bagaimana mekanisme koordinasi anatar Dinas Pendidikan dengan Sekolah terkait pelaksanaan Program MBG?	Untuk mengetahui bentuk komunikasi dan koordinasi anantara dinas dan sekolah.
6	Apakah terdapat kebijakan atau pedoman khusus dari Dinas Pendidikan terkait program MBG?	Untuk mengetahui dukungan regulasi dan kebijakan daerah terhadap program.
7	Bagaimana proses pendataan siswa penerima manfaat Program MBG dilakukan?	Untuk mengetahui mekanisme penentuan sasaran penerima manfaat program.
8	Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam mendukung implementasi Program MBG di Kabupaten Sorong?	Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program.
9	Bagaimana bentuk koordinasi Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan dan Bapperida dalam pelaksanaan program?	Untuk mengetahui sinergi lintas sektor dalam implementasi program.
10	Apakah Program MBG memeberi dampak terhadap kehadiran dan semangat belajar siswa?	Untuk menegtahui dampak program terhadap aktivitas belajar siswa.
11	Strategi apa yang dilakukan Dinas Pendidikan agar pelaksanaan Program MBG berjalan efektif dan berkelanjutan?	Untuk mengetahui upaya dan strategi keberlanjutan program.
12	Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menyesuaikan Program MBG dengan	Untuk mengetahui strategi adaptasi kebijakan di tingkat lokal.

	kondisi geografis dan sosial masyarakat Sorong?	
13	Bagaimana program MBG ini mendorong keterlibatan UMKM atau petani lokal dalam penyediaan bahan pangan? Mengetahui dampak pemberdayaan ekonomi lokal.	Bagaimana program MBG ini mendorong keterlibatan UMKM atau petani lokal dalam penyediaan bahan pangan? Mengetahui dampak pemberdayaan ekonomi lokal.
14	Bagaimana proses sinkronisasi kebijakan nasional Asta Cita dengan kondisi daerah Kabupaten Sorong?	Untuk mengetahui kesesuaian kebijakan pusat dan kebutuhan daerah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong

No	Item Pertanyaan	Keterangan
1	Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong?	Untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan dalam implementasi program
2	Bagaimana standar kualitas dan kandungan gizi makanan yang disediakan dalam program ini?	Untuk mengetahui standar gizi dan nutrisi yang diberikan dalam program.
3	Seberapa besar kontribusi MBG dalam menurunkan angka anemia dan stunting pada anak sekolah di Sorong?	Mengukur dampak kesehatan masyarakat.
4	Apakah terdapat pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada siswa?	Untuk mengetahui sistem pengawasan kualitas makanan.
5	Bagaimana kecukupan kandungan gizi dalam menu MBG dibanding standar AKG nasional? Membandingkan menu dengan standar nasional.	Membandingkan menu dengan standar nasional.
6	Bagaimana kesiapan tenaga kesehatan atau petugas gizi dalam mendukung Program MBG?	Untuk mengetahui kesiapan SDM bidang kesehatan dan gizi.
7	Bagaimana koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan sekolah dan instansi lain dalam pelaksanaan program?	Untuk mengetahui efektivitas koordinasi lintas sektor.
8	Menurut Bapak/Ibu, apakah Program MBG dapat membantu mengurangi masalah stunting dan gizi buruk di Kabupaten Sorong?	Untuk mengetahui pandangan terhadap dampak program pada status gizi masyarakat

Bapperida Kabupaten Sorong

No	Item Pertanyaan	Keterangan
1	Bagaimana peran Bapperida dalam perencanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong?	Untuk mengetahui peran Bapperida dalam perencanaan program daerah.
2.	Bagaimana kebijakan dan regulasi daerah mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong?	Mengetahui dukungan legal formal daerah.
3.	Bagaimana agenda Asta Cita diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program daerah?	Mengetahui sinkronisasi visi nasional dan daerah.
4.	Bagaimana mekanisme penganggaran dan alokasi dana daerah untuk mendukung program ini?	Mengetahui kesiapan finansial daerah.
5	Sejauh mana pemerintah daerah memiliki kemandirian dan keberlanjutan pendanaan untuk program ini?	Mengetahui aspek keberlanjutan fiskal.
6	Apakah Program MBG telah dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah?	Untuk mengetahui integrasi program dalam perencanaan pembangunan daerah.
7	Bagaimana bentuk koordinasi Bapperida dengan OPD lain dalam mendukung pelaksanaan Program MBG?	Untuk mengetahui bentuk koordinasi antar lembaga pemerintah daerah.
8	Bagaimana kesiapan pemerintah daerah dari sisi perencanaan dan kelembagaan dalam implementasi Program MBG?	Untuk mengetahui kesiapan kelembagaan pemerintah daerah.
9	Apa saja tantangan utama dalam perencanaan dan penganggaran Program MBG di Kabupaten Sorong?	Untuk mengetahui hambatan dalam aspek perencanaan dan pendanaan.
10	Bagaimana program MBG ini mendorong keterlibatan UMKM atau petani lokal dalam penyediaan bahan pangan? Mengetahui dampak pemberdayaan ekonomi lokal.	Mengetahui dampak pemberdayaan ekonomi lokal.

SMA Negeri 2 kabupaten Sorong

No	Item Pertanyaan	Keterangan
1	Bagaimana kesiapan SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong dalam mendukung pelaksanaan Program MBG?	Untuk mengetahui kesiapan sekolah dalam mendukung program.
2	Bagaimana mekanisme pelaksanaan program mulai dari perencanaan hingga distribusi di sekolah?	Mengetahui alur teknis operasional.
3	Apa peran kepala sekolah dan guru dalam mendukung Program MBG?	Untuk mengetahui keterlibatan pihak sekolah dalam program.

4	Bagaimana ketersediaan sarana prasarana seperti dapur, distribusi makanan, dan fasilitas sekolah?	Mengetahui kesiapan fisik pendukung.
5	Bagaimana respon siswa terhadap pelaksanaan Program MBG?	Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap program.
6	Apakah Program MBG berpengaruh terhadap kehadiran dan konsentrasi belajar siswa?	Untuk mengetahui dampak program pada proses belajar siswa.
7	Apa saja kendala yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan Program MBG?	Untuk mengetahui hambatan yang dialami pihak sekolah.
8	Bagaimana koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan dan pihak pelaksana program?	Untuk mengetahui hubungan kerja sama antara sekolah dan pemerintah.
9	Harapan apa yang ingin disampaikan sekolah terhadap keberlanjutan Program MBG?	Untuk mengetahui harapan sekolah terhadap pengembangan program.

Siswa SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong

No	Item Pertanyaan	Keterangan
1	Apakah Anda mengetahui tentang Program Makan Bergizi Gratis di sekolah?	Untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai program.
2	Bagaimana pendapat Anda mengenai makanan yang diberikan dalam Program MBG?	Untuk mengetahui penilaian siswa terhadap makanan program.
3	Apakah makanan yang diberikan sesuai dengan selera dan kebutuhan siswa?	Untuk mengetahui tingkat kesesuaian makanan dengan kebutuhan siswa.
4	Apakah program MBG ini membantu keluarga Anda dalam hal penghematan pengeluaran atau uang jajan?	Untuk mengetahui dampak ekonomi program bagi siswa dan keluarga.
5	Apa perubahan yang terjadi pada ketersediaan bahan makanan di rumah sejak adanya program ini?	Mengetahui stabilitas pangan keluarga.
6	Apakah setelah adanya Program MBG Anda merasa lebih semangat mengikuti pelajaran di sekolah?	Untuk mengetahui pengaruh program terhadap motivasi belajar siswa.
7	Apakah Program MBG mempengaruhi konsentrasi belajar Anda di kelas?	Untuk mengetahui dampak program terhadap konsentrasi belajar siswa.
8	Bagaimana kualitas makanan yang diberikan dari segi rasa, kebersihan, dan porsi?	Untuk mengetahui kualitas makanan dari perspektif siswa.
9	Apakah pelaksanaan Program MBG berjalan	Untuk mengetahui konsistensi

	rutin dan tepat waktu di sekolah?	pelaksanaan program di sekolah.
10	Kendala apa yang pernah Anda alami selama mengikuti Program MBG?	Untuk mengetahui hambatan yang dirasakan siswa selama program berlangsung.
11	Apa harapan Anda terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ke depan?	Untuk mengetahui masukan dan harapan siswa terhadap program.

Lampiran 2

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Alamat Kantor : Jl. Klamono Km. 24
 Email : dinaspendidikankabsorong@yahoo.co.id

Aimas, 12 Maret 2026

Nomor : 000.9/844
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Politik
 Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Di -
 Tempat

Menunjuk Surat Saudara Nomor : 132/I.3.AU/FHISIPOL/D/2026 tanggal 27 Februari 2026 perihal Surat Permohonan Izin Penelitian atas nama :

Nama : OKTORIANCE E DOWAI
 Selaku : Peneliti Utama
 Judul Penelitian : Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong

Maka dapat kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami dapat mengijinkan penelitian tersebut.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Ptt. Kepala Dinas




ANDREAS TAA
 NIP. 195808181999031005

DAFTAR 188 PROJEK PEMBANGUNAN SPPTG TERPILAH

No	SPPTG Melayu	Daerah
1	SPPTG Terengganu	J. Teluk Tasek, Kel. Amdak, Kel. Amdak
2	SPPTG Kelantan	J. Nangka Raka, Kel. Amdak, Kel. Amdak
3	SPPTG Kel. Bayan	J. Baya (Penger), Kel. Kuantan, Kel. Mambak
4	SPPTG Majlis Daerah	J. Penger, Kel. Majlis, Kel. Sabak
5	SPPTG Kelantan	J. Penger, Kel. Kelantan, Kel. Kelantan

Diserial dengan

DAFTAR 188 PROJEK PEMBANGUNAN SPPTG TERPILAH

◆ Jumlah Sekolah : 48
 ◆ Jumlah Projeck : 2
 ◆ Jumlah SP : 410
 ◆ Jumlah Peserta Didik : 9.839
 ◆ Total Penerima Manfaat : 10.348

Diserial dengan

DAFTAR 188 PROJEK PEMBANGUNAN SPPTG TERPILAH

25

□ SK Tahap 1 untuk proses Pembangunan
 □ SK Tahap 2 untuk proses Pembangunan

Diserial dengan

DAFTAR 188 PROJEK PEMBANGUNAN SPPTG TERPILAH

1. Mambak, Kel. Mambak	11. Mambak, Kel. Bayan	21. Mambak, Kel. Bayan
2. Mambak, Kel. Mambak	12. Mambak, Kel. Bayan	22. Mambak, Kel. Bayan
3. Mambak, Kel. Mambak	13. Mambak, Kel. Bayan	23. Mambak, Kel. Bayan
4. Mambak, Kel. Mambak	14. Mambak, Kel. Bayan	24. Mambak, Kel. Bayan
5. Mambak, Kel. Mambak	15. Mambak, Kel. Bayan	25. Mambak, Kel. Bayan
6. Mambak, Kel. Mambak	16. Mambak, Kel. Bayan	26. Mambak, Kel. Bayan
7. Mambak, Kel. Mambak	17. Mambak, Kel. Bayan	27. Mambak, Kel. Bayan
8. Mambak, Kel. Mambak	18. Mambak, Kel. Bayan	28. Mambak, Kel. Bayan
9. Mambak, Kel. Mambak	19. Mambak, Kel. Bayan	29. Mambak, Kel. Bayan
10. Mambak, Kel. Mambak	20. Mambak, Kel. Bayan	30. Mambak, Kel. Bayan

Diserial dengan

DAFTAR 188 PROJEK PEMBANGUNAN SPPTG TERPILAH

Kelurahan Mambak, Kel. Mambak

Diserial dengan

DAFTAR 188 PROJEK PEMBANGUNAN SPPTG TERPILAH

Kelurahan Mambak, Kel. Mambak

Diserial dengan

Dokumentasi

Lampiran 4 Dokumentasi



Bapak Andreas Taa, S.Ag.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong



Bapak I Ketut Widura, S.Pd., M.Pd.
Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong



Violi

ta Mutiara Gimmon dan Anggun Lukondo.

Siswa SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong



Bapak Julian Romeo Golkar, S.I.P., M.M

Sub Riset dan Inovasi Bapperida



Bpk dr. Ronney Ch.N. Kalesaran
Kepala Dinas Kesehatan